

**PENGARUH *FOREIGN DIRECT INVESTMENT*  
(FDI), PENGELUARAN PEMERINTAH, DAN  
PDRB PERKAPITA TERHADAP JUMLAH  
PENDUDUK MISKIN DI PROVINSI  
LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF  
EKONOMI ISLAM TAHUN  
2012-2021**

**Skripsi**

**DEWI UTARI  
NPM: 1951010053**



**Program Studi: Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/ 2023 M**

**PENGARUH *FOREIGN DIRECT INVESTMENT*  
(FDI), PENGELUARAN PEMERINTAH, DAN  
PDRB PERKAPITA TERHADAP JUMLAH  
PENDUDUK MISKIN DI PROVINSI  
LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF  
EKONOMI ISLAM TAHUN  
2012-2021**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas -Tugas Dan Memenuhi Syarat  
-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Dalam Bidang Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Oleh:**

**DEWI UTARI  
NPM.1951010053**

**Jurusan: Ekonomi Syariah**

**Pembimbing I : Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M. Si  
Pembimbing II : Okta Supriyaningsih, S.E., M.E. Sy**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/2023 M**

## ABSTRAK

Kemiskinan provinsi Lampung menduduki peringkat ketiga tertinggi di pulau Sumatera dan mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh *Foreign Direct Investment* (FDI), pengeluaran pemerintah, dan PDRB per kapita secara parsial dan secara bersama-sama terhadap jumlah penduduk miskin di provinsi Lampung dalam perspektif Ekonomi Islam tahun 2012-2021. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh dari variabel *Foreign Direct Investment* (FDI), pengeluaran pemerintah, dan PDRB per kapita secara parsial dan secara bersama-sama terhadap jumlah penduduk miskin di provinsi Lampung dalam perspektif ekonomi Islam tahun 2012-2021.

Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan data berupa angka-angka yang dinilai dan dianalisis dengan analisis statistik. Sumber data dalam menyusun penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder, data ini diperoleh secara tidak langsung melalui literatur yang telah ada. Data sekunder berbentuk data runtut waktu (*time series*) berupa data jumlah penduduk miskin yang didasarkan pada *Foreign Direct Investment* (FDI), pengeluaran pemerintah, dan PDRB per kapita di provinsi Lampung tahun 2012-2021.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, variabel *Foreign Direct Investment* (FDI) tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di provinsi Lampung tahun 2012-2021, variabel pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di provinsi Lampung tahun 2012-2021, dan PDRB per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di provinsi Lampung tahun 2012-2021. Sedangkan secara bersama-sama *Foreign Direct Investment* (FDI), pengeluaran pemerintah, dan PDRB per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di provinsi Lampung tahun 2012-2021. Berdasarkan penjelasan ayat-ayat mengenai *Foreign Direct Investment* (FDI), pengeluaran pemerintah, dan PDRB per kapita terhadap jumlah penduduk miskin dalam perspektif ekonomi Islam, bahwa dalam Islam memberikan solusi dalam pengentasan kemiskinan melalui variabel terkait, Islam juga mengajarkan kepada umat manusia agar menjalankan segala sesuatu berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits.

**Kata Kunci : Kemiskinan, *Foreign Direct Investment* (FDI), Pengeluaran Pemerintah, PDRB Per Kapita, Ekonomi Islam**

## **ABSTRACT**

*Poverty in Lampung Province is the third highest in Sumatra and experiences fluctuating growth. The formulation of the problem in this study is whether there is an influence of Foreign Direct Investment (FDI), government spending, and GDP per capita partially and together on the number of poor people in Lampung Province from the perspective of Islamic Economics in 2012-2021. The purpose of this study was to determine the extent to which Foreign Direct Investment (FDI), government spending, and GRDP per capita influence the number of poor people in Lampung Province from an Islamic economic perspective in 2012-2021.*

*The research method used is quantitative. Quantitative research is research that uses data in the form of numbers that are assessed and analyzed by statistical analysis. Sources of data in compiling this study, researchers used secondary data, this data was obtained indirectly through existing literature. Secondary data is in the form of time series data in the form of data on the number of poor people based on Foreign Direct Investment (FDI), government spending, and GRDP per capita in Lampung province in 2012-2021.*

*The results show that partially, the Foreign Direct Investment (FDI) variable has no significant effect on the number of poor people in Lampung province in 2012-2021, the government spending variable has no significant effect on the number of poor people in Lampung province in 2012-2021, and GRDP per capita has a negative and significant effect on the number of poor people in Lampung province in 2012-2021. Meanwhile, Foreign Direct Investment (FDI), government Expenditure, and GRDP per capita have had a negative and significant impact on the number of poor people in Lampung province in 2012-2021. Based on the explanation of the verses regarding Foreign Direct Investment (FDI), government spending, and GRDP per capita on the number of poor people in an Islamic economic perspective, that in Islam providing solutions to poverty alleviation through related variables, Islam also teaches mankind to carry out all something based on the Al- Qur'an and Haditsh.*

**Keyword : Poverty, Foreign Direct Investment (FDI), Government Expenditure, GRDP Per Capita, Islamic Economic**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Utari  
NPM : 1951010053  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pengaruh *Foreign Direct Investment (FDI)*, Pengeluaran Pemerintah, dan PDRB Per Kapita terhadap Jumlah Penduduk Miskin di provinsi Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2012-2021”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau saduran dan karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar rujukan. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 26 April 2023

Penulis,



Dewi Utari  
NPM.1951010053



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame I Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung*

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **Pengaruh Foreign Direct Investment (FDI), Pengeluaran Pemerintah dan PDRB Perkapita terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2012-2021**

Nama Mahasiswa : Dewi Utari  
NPM : 1951010053  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M. Si**

**Okta Supriyaningsih, S.E., M.E. Sy**

NIP. 1980080120031121001

NIP. 2013010919841028163

**Mengetahui,**  
**Ketua Jurusan Ekonomi Syariah**

**Dr. Erike Anggraeni, M.E. Sy**

NIP. 198208082011012009



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

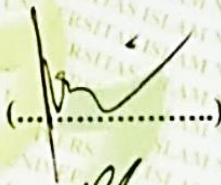
*Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame I Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“PENGARUH FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI), PENGELUARAN PEMERINTAH, DAN PDRB PERKAPITA TERHADAP JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI PROVINSI LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TAHUN 2012-2021”** disusun oleh, Dewi Utari, NPM: 1951010053, program studi Ekonomi Syariah, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Selasa/16 Mei 2023

**TIM PENGUJI**

**Ketua Sidang : Dr. H. Nasrudin, M. Ag**

(.....  


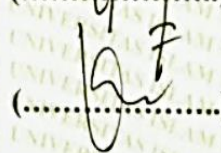
**Sekretaris : Is Susanto, M.E. Sy**

(.....  


**Penguji I : Ersi Sisdianto, S.E.I., M.Ak**

(.....  


**Penguji II : Okta Supriyaningsih, S.E., M.E. Sy**

(.....  


Mengetahui,

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**



**Prof. Dr. Julius Suryanto, M.M., Akt., C.A**

197009262008011008

## MOTTO

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ۱۰

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.”

(Q.S Al-Jumuah (62):10)





## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbil'alamin*, dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah Swt. karena berkat rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan ketulusan hati dan dengan penuh kasih sayang. Sebagai tanda bukti dan terima kasih yang tulus, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada, kedua orang tua tercinta, Bapak Masrur dan Ibu Nur Janah, terima kasih atas doa, cinta, kasih sayang, pengorbanan, dukungan serta motivasi yang selalu diberikan selama ini, semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kebahagiaan dan perlindungan oleh Allah Swt. baik di dunia maupun di akhirat kelak. Adik tersayang, Ifnu Fadil yang telah memberikan semangat dan dukungannya. Teruntuk diri sendiri, terima kasih atas perjuangannya telah menyelesaikan amanah ini dengan penuh pengorbanan, semoga senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran dan kebahagiaan dalam setiap langkah.



## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Dewi Utari dilahirkan di Desa Cabang Empat, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, pada tanggal 26 Maret 2001. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Masrur dan Ibu Nur Janah. Adapun riwayat pendidikan yang ditempuh penulis dimulai dari TK Al-Hidayah Cabang Empat lulus pada tahun 2007, Sekolah Dasar Negeri 01 Cabang Empat, lulus pada tahun 2013, SMP Pelita Cabang Empat lulus pada tahun 2016, SMKN 01 Abung Selatan lulus pada tahun 2019 dan mengikuti pendidikan perguruan tinggi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Raden Intan Lampung dimulai pada tahun 2019.



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah Swt. yang telah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh *Foreign Direct Investment (FDI)*, Pengeluaran Pemerintah, dan PDRB Per Kapita terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2012-2021”**, dan tidak lupa sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah membawa kita dari zaman *jahiliyah* ke zaman yang penuh dengan keilmuan. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang Ilmu Ekonomi Islam.


Dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan tidak akan berhasil tanpa adanya bantuan, bimbingan serta saran dari pihak-pihak terkait. Dengan ini maka penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Tulus Suryanto, M.M., Akt., CA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. Erike Anggraeni, M.E., Sy, selaku Ketua Program Studi/Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
3. Muhammad Kurniawan, M.E., Sy, selaku Sekretaris Program Studi/Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
4. Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M. Si, selaku pembimbing I, dan Ibu Okta Supriyaningsih, S.E, M.E., Sy, selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta pemikirannya untuk memberikan arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah

mendidik dan memberikan ilmunya serta motivasi kepada penulis.

6. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, tempat penulis memperoleh data untuk menyelesaikan penelitian ini.
7. Keluarga besar tercinta, yang telah memberikan dukungannya.
8. Kakakku, yang senantiasa memberikan semangat.
9. Sahabatku tersayang d'*Anaphalis* (Felia Maghfira, Dini Anggraini dan Arnova Witiar Nidah) yang telah membantu, memberikan dukungan dan semangat selama proses pendidikan dan pengerjaan skripsi.
10. Sahabatku Indri Setia Ningsih, Berisa Parmalidia, Putri Winar Wati dan Lilik Nur Atikah.
11. Seluruh teman-teman Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang terlibat dalam penelitian ini.
12. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.
13. Semua pihak terkait yang telah membantu dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, akan tetapi diharapkan dapat memberikan manfaat keilmuan yang berarti dalam bidang Ekonomi Islam.



Bandar Lampung, 26 April 2023  
Penulis,

Dewi Utari

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvii</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	14
D. Rumusan Masalah .....	15
E. Tujuan Penelitian.....	15
F. Manfaat Penelitian.....	16
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	17
H. Sistematika Penulisan .....	21
 <b>BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS</b>	
A. Landasan Teori .....	23
1. Konsep Kemiskinan.....	23
a. Definisi Kemiskinan .....	23
b. Bentuk-bentuk Kemiskinan.....	25
c. Indikator Kemiskinan.....	28
d. Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan.....	30
e. Teori Penyebab Kemiskinan .....	34
f. Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Islam .....	35

2.	Konsep <i>Foreign Direct Investment</i> (FDI).....	42
a.	Definisi <i>Foreign Direct Investment</i> (FDI) .....	42
b.	Syarat Penanaman Modal Asing (PMA/FDI) .....	43
c.	Bentuk-bentuk <i>Foreign Direct Investment</i> (FDI)...	44
d.	Manfaat <i>Foreign Direct Investment</i> (FDI).....	46
e.	Indikator Keputusan <i>Foreign Direct Investment</i> (FDI) .....	49
f.	Faktor-faktor Mempengaruhi <i>Foreign Direct</i> <i>Investment</i> (FDI) .....	50
g.	Teori <i>Foreign Direct Investment</i> (FDI).....	52
h.	<i>Foreign Direct Investment</i> (FDI) dalam Perspektif Ekonomi Islam .....	56
3.	Konsep Pengeluaran Pemerintah .....	58
a.	Definisi Pengeluaran Pemerintah.....	58
b.	Teori Pengeluaran Pemerintah .....	59
c.	Indikator Pengeluaran Pemerintah .....	63
d.	Pengeluaran Pemerintah dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	68
4.	Konsep PDRB Per Kapita.....	70
a.	Definisi PDRB Per Kapita .....	70
b.	Pendekatan PDRB.....	72
b.	Indikator PDRB Per Kapita.....	74
c.	PDRB Perkapita dalam Perspektif Ekonomi Islam	75
B.	Kerangka Berfikir .....	76
C.	Pengajuan Hipotesis .....	77

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A.	Waktu dan Tempat Penelitian .....	83
B.	Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	83
C.	Populasi dan Sampel Penelitian.....	84
D.	Jenis dan Sumber Data .....	84
E.	Teknik Pengumpulan Data .....	86
F.	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	86
G.	Uji Prasarat Analisis .....	89
H.	Uji Hipotesis.....	90

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A.	Deskripsi Data .....	95
B.	Hasil Analisis Data .....	100
1.	Hasil Uji Asumsi Klasik .....	100
a.	Uji Normalitas .....	101
b.	Uji Multikolinearitas .....	102
c.	Uji Heteroskedastisitas .....	103
d.	Uji Autokorelasi .....	103
2.	Hasil Uji Regresi Linier Berganda .....	104
3.	Hasil Uji Hipotesis .....	106
a.	Uji T (Uji Parsial) .....	106
b.	Uji F (Uji serempak/keseluruhan) .....	109
c.	Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	109
C.	Pembahasan Analisis Data .....	106
1.	Pengaruh <i>Foreign Direct Investment</i> (FDI) terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Lampung tahun 2012-2021 .....	110
2.	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Lampung tahun 2012-2021 .....	114
3.	Pengaruh PDRB Per Kapita terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Lampung tahun 2012-2021 .....	117
4.	Pengaruh <i>Foreign Direct Investment</i> , Pengeluaran Pemerintah, dan PDRB Per Kapita secara bersama-sama terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam tahun 2012-2021 .....	120

## **BAB V PENUTUP**

A.	Simpulan .....	135
B.	Rekomendasi .....	137

## **DAFTAR RUJUKAN**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Lampung Tahun 2012-2021 (ribu jiwa).....	6
Tabel 1.2 <i>Foreign Direct Investment</i> (FDI) Provinsi Lampung Tahun 2012-2021 (Juta US\$) .....	9
Tabel 1.3 Realisasi Pengeluaran pemerintah Provinsi Lampung tahun 2012-2021 (dalam rupiah) .....	11
Tabel 1.4 PDRB Per kapita Provinsi Lampung tahun 2012-2021 (dalam rupiah) .....	13
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel Penelitian .....	87
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) .....	96
Tabel 4.2 <i>Foreign Direct Investment</i> (FDI) (dalam Rupiah).....	97
Tabel 4.3 Pengeluaran Pemerintah (dalam Rupiah) .....	98
Tabel 4.4 PDRB Per kapita (dalam Rupiah) .....	100
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas .....	102
Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	103
Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi.....	104
Tabel 4.8 Hasil Uji Regresi Linier Berganda .....	106
Tabel 4.9 Hasil Uji Parsial (Uji t).....	107
Tabel 4.10 Hasil Uji Simultan (Uji F).....	109
Tabel 4.11 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	110



## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 1.1 Rata-rata Persentase Penduduk Miskin Menurut Pulau Sumatera tahun 2012-2021.....	5
Gambar 2.1 Lingkaran Setan Kemiskinan ( <i>The Vicious Circle of Poverty</i> ) .....	34
Gambar 2.2 Kerangka Berfikir .....	76
Gambar 4.1 Uji Normalitas .....	101



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Data Jumlah Penduduk Miskin dan FDI
- Lampiran 2. Data Pengeluaran Pemerintah dan PDRB Per Kapita
- Lampiran 3. Hasil Uji Normalitas, Multikolinearitas, dan Heteroskedastisitas
- Lampiran 4. Hasil Uji Autokorelasi dan Regresi Linier Berganda
- Lampiran 5. Hasil Uji t (uji parsial), Hasil Uji Serempak/keseluruhan, dan Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )
- Lampiran 6. Tabel Uji t (uji parsial)/ t Tabel
- Lampiran 7. Surat Riset/Penelitian
- Lampiran 8. Surat Bebas Turnitin
- Lampiran 9. Originality Report Turnitin



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal untuk memperoleh gambaran yang jelas dan mudah dipahami tentang penelitian ini, perlu digaris bawahi arti dan maksud dari beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Terkait dengan judul ini, diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman dengan makna yang digunakan. Judul penelitian ini adalah “**Pengaruh *Foreign Direct Investment (FDI)*, Pengeluaran Pemerintah, dan PDRB Per Kapita terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam tahun 2012-2021**”. Adapun beberapa istilah yang perlu uraikan dalam penelitian ini, antara lain:

1. ***Foreign Direct Investment (FDI)*** atau investasi asing langsung merupakan suatu kegiatan dalam menanam modal untuk melakukan usaha yang dilakukan oleh suatu negara ke negara lain.<sup>1</sup>
2. **Pengeluaran Pemerintah** adalah seluruh pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membiayai program-program pemerintah yang ditujukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.<sup>2</sup>
3. **PDRB Per Kapita** merupakan gambaran pembangunan ekonomi disuatu wilayah yang dapat menjelaskan kesejahteraan tiap-tiap penduduk di wilayah tersebut.<sup>3</sup>
4. **Penduduk Miskin** adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Windhu Putra, *Perekonomian Indonesia Penerapan Beberapa Teori Ekonomi Pembangunan Di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 124.

<sup>2</sup> Rita Yunus and Anas Iswanto Anwar, *Ekonomi Publik*, (Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2021), 28.

<sup>3</sup> Nurani Vita Christiani and Anna Ellenora Nainupu, “Pengaruh Akses Terhadap Internet, Listrik Dan PDRB Per Kapita Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2019”, *Jurnal Statistika Terapan (ISSN 2807-6214)*, Vol. 1, No. 1, (2021), 37–52.

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, “Profil Kemiskinan Lampung”, diakses pada 02 Februari pukul 13.07.

5. **Perspektif** adalah sudut pandang; pandangan.<sup>5</sup>
6. **Ekonomi Islam** adalah ilmu yang mempelajari kegiatan manusia dalam menggunakan sumber daya untuk menghasilkan barang dan jasa dengan tidak meninggalkan aturan yang telah ditetapkan oleh ajaran agama Islam.<sup>6</sup>

## B. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan menggambarkan suatu kondisi ketiadaan kepemilikan dan rendahnya pendapatan atau suatu kondisi tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar manusia.<sup>7</sup> Isu kemiskinan merupakan isu yang sangat penting karena diantara tujuan pembangunan ekonomi adalah bagaimana mengentaskan kemiskinan dan meminimalisir kesenjangan antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Pembangunan diartikan sebagai konsep yang mempelajari dan menganalisis proses pembangunan dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Pendekatan konsep ekonomi pembangunan ini juga sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu bangsa.<sup>8</sup> Upaya pengentasan kemiskinan dilakukan agar terwujudnya cita-cita bangsa yaitu, terciptanya masyarakat yang adil dan makmur.<sup>9</sup>

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk miskin adalah penduduk yang pengeluaran per kepala per bulannya di bawah garis kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) mengklasifikasikan garis kemiskinan memiliki dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan/Pangan (GKM), yang berarti bahwa nilai makanan yang dikonsumsi terdiri dari kebutuhan kalori harian per kepala, dengan minimum 2100 kalori. Komponen selanjutnya adalah Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Komponen-komponen ini memiliki per-

---

<sup>5</sup> Perspektif, "(on-line) tersedia di <https://kbbi.web.id/perspektif.html>.", diakses pada tanggal 14 Januari 2023.

<sup>6</sup> Muhammad Arif, *Filsafat Ekonomi Islam*, (Merdeka Kreasi Group, 2022), 9-10.

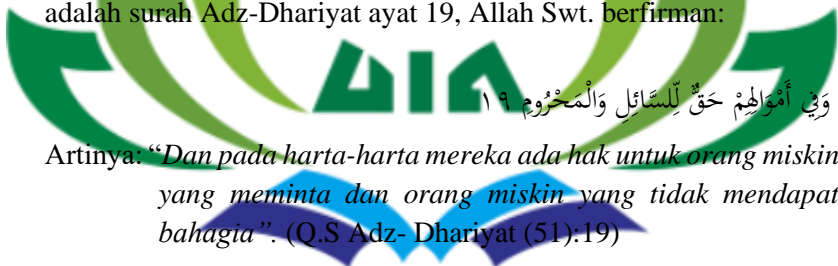
<sup>7</sup> Ardito Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 9.

<sup>8</sup> Irfan Syauqi Beik and Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 15.

<sup>9</sup> Sujana Royat, *Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan*, (Jakarta: Menko Kesra Bidang Koordinasi Pengurangan Kemiskinan, 2015), 9.

syaratan untuk kebutuhan minimum berupa perumahan, pakaian, pendidikan, dan kesehatan.<sup>10</sup>

Al-Ghazali dalam Huda, mendefinisikan kemiskinan dalam padangan ekonomi Islam sebagai ketidakmampuan individu untuk menghidupi dirinya sendiri. Tidak mampu menyediakan apa yang tidak dibutuhkan bukanlah kemiskinan. Jika seseorang memiliki kekayaan yang diinginkan, dia tidak dianggap miskin. Oleh karena itu, kemiskinan terbagi menjadi dua kategori, pertama kemiskinan terkait kebutuhan material dan kedua kemiskinan terkait kebutuhan spiritual.<sup>11</sup> Ekonomi Islam mencakup pembahasan atas perilaku ekonomi manusia yang sadar dan berusaha untuk mencapai *mashlahah* atau *falah* (kesejahteraan).<sup>12</sup> Upaya pengentasan kemiskinan berdasarkan ekonomi Islam mengedepankan kedudukan manusia di dunia sebagai khalifah. Dalam hal ini, perilaku umat manusia dalam ekonomi Islam meliputi solusi yang diberikan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan. Perhatian Islam mengenai permasalahan kemiskinan sangat besar, banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang didalamnya menjelaskan tentang kemiskinan, salah satunya adalah surah Adz-Dharyyat ayat 19, Allah Swt. berfirman:



Kandungan ayat diatas adalah mereka menetapkan bagian tertentu bagi peminta-minta yang meminta, lalu diberi, juga bagian tertentu bagi siapa yang diam dan malu, sehingga dia mendapat bagian. Mereka menetapkan bagian tertentu sebagai hak yang wajib dibayarkan dari hartanya. Mereka menetapkan hak yang tiada batasnya itu secara suka rela.<sup>13</sup>

<sup>10</sup> Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, “Profil Kemiskinan Lampung.” diakses pada tanggal 7 Februari 2023.

<sup>11</sup> Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2015), 23.

<sup>12</sup> Arif, *Filsafat Ekonomi Islam...*, 19.

<sup>13</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 38.

Al-Qardhawi dalam Edwin, menjelaskan bahwa menurut pandangan Islam tidak dapat dibenarkan kehidupan di negara Muslim bahkan jika Ahl Al-Dimma (sebelumnya non-Muslim) merasakan kelaparan, tidak berpakaian, tunawisma (tidak memiliki tempat tinggal), dan ajaran Islam menyatakan berperang terhadap kemiskinan dan mencoba untuk mencegahnya serta melihat peluang yang dapat menjadi pemicunya. Tujuannya adalah untuk melindungi iman, moral dan perilaku, melindungi kehidupan keluarga, melindungi stabilitas dan ketentraman masyarakat dan menciptakan persaudaraan di antara anggota.<sup>14</sup>

Islam juga mengatakan bahwa kemiskinan tidak boleh disebabkan oleh faktor terlalu malas untuk berusaha, sesuatu yang sangat dikutuk oleh ajaran Islam. Islam menganjurkan membelanjakan uang untuk orang miskin, meskipun dengan jumlah sedikit. Jangan biarkan mereka tidak berbagi sepanjang hidup mereka karena kemiskinan. Ketika kita berbicara tentang kemiskinan, maka yang ditekankan adalah upaya untuk menjaga, dan melindungi kelompok orang miskin yang dilakukan oleh orang yang dianggap berkuasa atau golongan mampu. Orang-orang ini diharapkan dapat mengembangkan keterampilan yang dimiliki golongan miskin, sehingga kemiskinan dapat diminimalisir.<sup>15</sup>

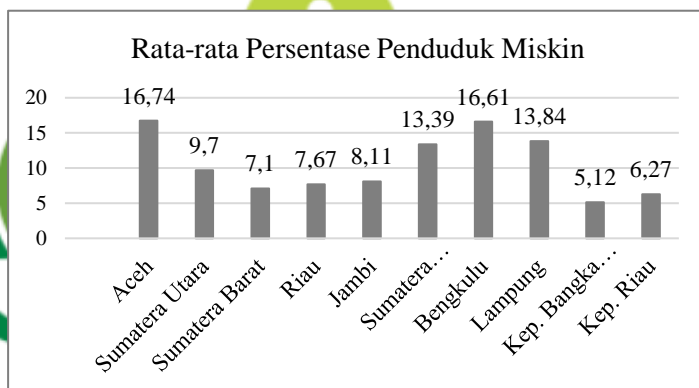
Berbicara mengenai kemiskinan, provinsi Lampung merupakan provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi ketiga di pulau Sumatera, hal ini menunjukkan bahwa provinsi Lampung masih jauh tertinggal dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain yang tingkat penduduk miskinnya jauh lebih rendah. Padahal jika dilihat dilapangan provinsi Lampung sendiri merupakan provinsi yang sangat strategis, dilihat dari keadaan geografis provinsi Lampung merupakan gerbang lalu lintas kegiatan ekonomi antara pulau Jawa dan Sumatera hal ini juga ditunjang oleh sumber daya alam yang dimiliki oleh provinsi Lampung. Mata pencaharian masyarakat pesisir Lampung sebagian besar adalah nelayan dan bercocok tanam, sedangkan mata pencaharian masyarakat di

---

<sup>14</sup> Naerul Edwin, "Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Politik Islam", *Jurnal Islamic Economic*, Vol. 8, No. 2, (2017), 169-188.

<sup>15</sup> Beik and Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah...*, 71.

wilayah tengah atau dataran kebanyakan berkebun lada, kopi, cengkeh, kayu manis, dan tanaman hortikultura lainnya. Lampung merupakan daerah penting dalam pengembangan lahan bagi perkebunan besar, seperti kelapa sawit, karet, padi, singkong, kakao, lada hitam, kopi, jagung, dan tebu. Sedang di beberapa daerah pesisir, komoditas perikanan seperti tambak udang cukup menonjol. Selain hasil bumi, Lampung juga merupakan kota Pelabuhan. Dari hasil bumi yang melimpah, muncul banyak industri-industri yang tersebar di kabupaten dan kota.<sup>16</sup> Namun realitanya, jika dibandingkan dengan beberapa provinsi lain yang ada di pulau Sumatera tingkat kemiskinan provinsi Lampung justru cukup tinggi. Berikut adalah data persentase penduduk miskin menurut provinsi di Sumatera tahun 2012-2021 yaitu:



**Gambar 1.1 Rata-rata Persentase Penduduk Miskin Pulau Sumatera tahun 2012-2021**

*Sumber: BPS Provinsi Lampung tahun 2012-2021 (data diolah)*

Berdasarkan data yang telah disajikan pada Gambar 1.1, dalam kurun waktu 10 tahun rata-rata persentase penduduk miskin pulau Sumatera tertinggi ditempati oleh provinsi Aceh dengan angka kemiskinan sebesar 16,74 %, kemudian disusul oleh provinsi Bengkulu dengan angka kemiskinan sebesar 16,61 %, provinsi

<sup>16</sup> Ridwan Saifuddin et al., *Menggali Akar Kemiskinan: Melihat Dari Dekat Kemiskinan Di Provinsi Lampung*, (Bandar Lampung: Balitbangda Provinsi Lampung, 2018), 10.

Lampung sendiri menduduki posisi ketiga sebesar 13,84 %, dan tingkat kemiskinan terendah diduduki oleh provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan angka sebesar 5,12 %. Angka kemiskinan provinsi Lampung tidak sebesar provinsi Aceh dan Bengkulu, namun dengan posisi tingkat kemiskinan tertinggi ketiga sudah cukup menunjukkan bahwa provinsi Lampung masih jauh tertinggal dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain yang tingkat penduduk miskinnya jauh lebih rendah, padahal jika dilihat dari keadaan geografis provinsi Lampung merupakan daerah yang strategis, menjadi gerbang lalu lintas kegiatan ekonomi antara pulau Jawa dan Sumatera, kemudian ditunjang oleh sumber daya alam yang dimiliki oleh provinsi Lampung itu sendiri, seharusnya dengan kondisi yang sudah cukup mendukung dari berbagai aspek, provinsi Lampung harus mampu mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada.

Adapun berikut ini disajikan data jumlah penduduk miskin provinsi Lampung dalam ribu jiwa tahun 2012-2021 guna memperoleh penjelasan yang lebih rinci terkait tingginya tingkat kemiskinan di provinsi Lampung:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Lampung**  
**Tahun 2012-2021 (Ribu Jiwa)**

Tahun	Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)
2012	1253,83
2013	1163,06
2014	1142,92
2015	1163,49
2016	1169,6
2017	1131,73
2018	1097,05
2019	1063,66
2020	1049,32
2021	1083,93

*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi  
Lampung tahun 2012-2021 (data diolah)*



Berdasarkan tabel 1.1, menunjukkan bahwa penduduk miskin provinsi Lampung dalam kurun waktu 10 tahun mengalami pertumbuhan yang fluktuatif, jumlah penduduk miskin tertinggi pada tahun 2012 sebesar 1253,83 jiwa, tingkat kemiskinan provinsi Lampung beberapa kali mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, kenaikan jumlah penduduk miskin di provinsi Lampung terjadi pada tahun 2015, 2016 dan 2021, angka kemiskinan provinsi Lampung pada tahun 2015 sebesar 1163,49 jiwa, pada tahun 2016 sebesar 1169,6 jiwa dan tahun 2021 sebesar 1083,93 jiwa, meskipun jumlah penduduk miskin tahun 2021 tidak sebesar tahun 2015 dan 2016 namun jumlah penduduk miskin pada tahun 2021 cenderung lebih tinggi dari pada dua tahun sebelumnya. Naiknya jumlah penduduk miskin di provinsi Lampung pada tahun 2021 disebabkan oleh pandemi akibat dari adanya virus *Covid-19*, dimana pada saat itu seluruh kegiatan ekonomi terkendala, tidak hanya itu, angka pengangguran pun semakin tinggi dikarenakan oleh banyaknya pekerja yang kehilangan pekerjaan, bahkan mengalami kerugian dalam berbagai bidang usahanya sehingga pendapatan masyarakat pun menurun. Besar kecilnya pendapatan masyarakat mempengaruhi jumlah penduduk miskin, jika tidak terjadi peningkatan pendapatan, maka semakin tinggi garis kemiskinan, dan semakin banyak penduduk yang tergolong miskin.<sup>17</sup>

Masalah kemiskinan dapat dipandang sebagai masalah pembangunan ekonomi, dimana proses perubahan yang terus menerus menuju perbaikan termasuk usaha meningkatkan produk per kapita.<sup>18</sup> Salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan ekonomi adalah menurunkan laju pertumbuhan penduduk miskin. Efektivitas dalam menurunkan jumlah penduduk miskin merupakan pertumbuhan utama dalam memilih strategi atau instrumen pembangunan. Hal ini berarti salah satu kriteria utama pemilihan sektor titik berat atau sektor andalan pembangunan nasional adalah efektivitas dalam penurunan jumlah penduduk miskin.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid...*, 12.

<sup>18</sup> Darwin Damanik, Hermanto, and dkk, *Ekonomi Makro*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), 29.

<sup>19</sup> Elda Wahyu Azizah and Hendra Kusuma, "Pengaruh Pendidikan, Pendapatan Perkapita Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur", *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, Vol. 2, No. 1, (2018), 167–180.

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan pembangunan, dalam hal ini pembangunan tidak terlepas dari sumber-sumber yang menjadikan pembangunan itu tetap berjalan dengan baik, salah satu sumber yang dijadikan sasaran pemerintah dalam proses pembangunan salah satunya adalah investasi, baik investasi dalam negeri maupun investasi luar negeri. Dalam teori ekonomi makro, investasi berarti pembelian barang produksi dari modal, barang produksi yang dimaksud adalah barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang, contohnya membangun pabrik, pembukaan lahan perkebunan hingga penanaman dan pembelian kendaraan untuk angkutan barang dan sebagainya.<sup>20</sup>

Pemerintah sangat membutuhkan investasi, terlebih dengan investasi asing, modal asing merupakan salah satu sumber yang menjadi sasaran pemerintah untuk membantu proses pertumbuhan ekonomi dan juga merupakan kekayaan devisa negara. Modal asing juga sebagai pengisi kesenjangan antara persediaan tabungan devisa, penerimaan pemerintah, keterampilan manajerial untuk mencapai pertumbuhan, membuka lapangan kerja baru sehingga mengurangi pengangguran dan dapat menekan angka kemiskinan.<sup>21</sup>

Investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment*), merupakan suatu kegiatan dalam menanamkan modal yang dilakukan oleh suatu negara ke negara lain.<sup>22</sup> Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) memberikan definisi FDI yang terjadi ketika seorang investor di suatu negara memperoleh aset di negara lain dengan maksud untuk mengelola aset tersebut. FDI dapat membawa tambahan modal asing yang sangat dibutuhkan, dan teknologi canggih serta peningkatan keterampilan manajerial, hal itu dianggap sebagai bagian penting dari pembangunan ekonomi dan proses globalisasi keuangan.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Karya and Syamsuddin, *Makro Ekonomi Pengantar Untuk Manajemen*, 72.

<sup>21</sup> Windhu Putra, *Perekonomian Indonesia Penerapan Beberapa Teori Ekonomi Pembangunan Di Indonesia*, 140.

<sup>22</sup> Astuty, "Analisis Investasi Asing Langsung Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Di Indonesia"..., 48-62.

<sup>23</sup> Xinxin Wang et al., "Foreign Direct Investment and Economic Growth: A Dynamic Study of Measurement Approaches and Results", *Economic Research-Ekonomska Istraživanja*, Vol. 35, No. 1, (2022), 1011–1034.

Selain itu, investor yang menanamkan modalnya disuatu negara atau wilayah untuk mendirikan usahanya akan membuka lapangan pekerjaan dengan merekrut tenaga kerja yang ada disuatu wilayah tersebut, tenaga kerja ini merupakan faktor pendorong pertumbuhan ekonomi. Semakin banyak tenaga kerja berkualitas yang tersedia, maka output yang dihasilkan akan semakin banyak, sehingga akan mempengaruhi pendapatan perkapita. Ketika pendapatan perkapita naik maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat, meningkatnya penyerapan tenaga kerja sebagai modal untuk pembangunan daerah akan menjadi jalan untuk menurunkan tingkat kemiskinan yang terjadi.<sup>24</sup>

Berikut persentase *Foreign Direct Investment* (FDI) provinsi Lampung tahun 2012-2021:

**Tabel 1.2**  
***Foreign Direct Investment* (FDI) / Investasi Asing**  
**Provinsi Lampung Tahun 2012-2021 (dalam Juta US\$)**

Tahun	FDI (Juta US\$)
2012	114,3
2013	46,8
2014	156,5
2015	257,7
2016	85,7
2017	120,6
2018	132,3
2019	155,2
2020	498,4
2021	173,8

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung tahun 2012-2021 (data diolah)

---

<sup>24</sup> Lufi Supratiyoningsih and Ni Nyoman, "Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Bali", *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, Vol. 11, No. 01, (2022), 1–14.

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, menunjukkan bahwa nilai FDI di provinsi Lampung dalam kurun waktu 10 tahun mengalami fluktuatif, FDI terendah terjadi pada tahun 2013 dengan nilai sebesar 46,8 US\$, FDI tertinggi provinsi Lampung terjadi pada tahun 2020 mencapai angka 498, 4 US\$, tingginya FDI pada tahun 2020 hal ini disebabkan oleh melemahnya perekonomian Indonesia pada tahun tersebut, dimana Indonesia dilanda krisis ekonomi yang disebabkan oleh *Covid-19*, sehingga investasi asing sangat dibutuhkan sebagai tambahan modal guna menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi Indonesia khususnya provinsi Lampung.

Dalam perekonomian, pemerintah merupakan salah satu agen ekonomi, dimana pemerintah bertugas mengatur, mengendalikan serta melakukan kontrol terkait roda perekonomian.<sup>25</sup> Dengan ini perekonomian memiliki hubungan yang erat dengan kebijakan pemerintah mengenai pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah juga dapat diartikan sebagai penggunaan uang dan sumber daya suatu negara untuk membiayai suatu kegiatan negara atau pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.<sup>26</sup>

Upaya pengentasan kemiskinan tidak lepas dari pengeluaran pemerintah, pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah maka semakin besar pula pengeluaran pemerintah.<sup>27</sup> Dalam hal ini, pengeluaran pemerintah yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan yang ada. Berikut adalah data pengeluaran pemerintah provinsi Lampung tahun 2012-2021:

---

<sup>25</sup> Lora Ekana Nainggolan and Dkk, *Ekonomi Makro*, (Pematangsiantar: Yayasan Kita Menulis, 2021), 10.

<sup>26</sup> Karya and Syamsuddin, *Makro Ekonomi Pengantar Untuk Manajemen*, 180.

<sup>27</sup> *Ibid...*, 181.

**Tabel 1.3**  
**Realisasi Pengeluaran Pemerintah Provinsi Lampung**  
**Tahun 2012-2021 (dalam Rupiah)**

Tahun	Pengeluaran Pemerintah (Rp)
2012	3.859.692.967
2013	3.925.661.229
2014	4.567.673.497
2015	4.723.690.698
2016	5.691.234.106
2017	7.017.854.660
2018	7.633.025.849
2019	7.807.923.450
2020	7.355.451.860
2021	7.652.495.281

*Sumber: BPS Provinsi Lampung tahun 2012-2021*  
*(data diolah)*

Berdasarkan tabel 1.3 di atas, disajikan realisasi pengeluaran pemerintah provinsi Lampung kurun waktu 10 tahun, pengeluaran pemerintah tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 7.807.923.450, hal ini disebabkan oleh perubahan seluruh komponen pendukungnya seperti belanja langsung dan tidak langsung mengalami kenaikan, kemudian realisasi pengeluaran pemerintah terendah terjadi pada tahun 2012 sebesar 3.859.692.967. Secara keseluruhan pengeluaran pemerintah provinsi Lampung mengalami pertumbuhan yang meningkat pada setiap tahunnya, namun pada tahun 2020 realisasi pengeluaran pemerintah provinsi Lampung mengalami penurunan yang signifikan sebesar 452.471.590, terjadinya penurunan ini dikarenakan pemerintah mengurangi alokasi dibidang infrastruktur dan meningkatkan anggaran untuk kesehatan sesuai dengan fokus pemerintah dalam menanggulangi pandemi *Covid-19* pada tahun tersebut.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Kementerian Keuangan RI, "Pemulihan Perekonomian Indonesia Setelah Kontraksi Akibat Pandemi Covid-19", 2022, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/>, Accessed 04 Maret 2023.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Lampung, pengeluaran pemerintah terdiri atas belanja tidak langsung, belanja langsung dan pembiayaan daerah, belanja tidak langsung diantaranya adalah belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja bantuan sosial, belanja tak terduga, dan belanja bagi hasil. Belanja langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Menurut Badan Pusat Statistik, realisasi pengeluaran pemerintah provinsi Lampung menduduki posisi pertama di Indonesia tahun 2021, namun realisasi pengeluaran lebih banyak digunakan untuk belanja kegiatan rutin seperti belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Pengeluaran pemerintah tidak hanya dilihat oleh besar nilainya saja namun juga harus dilihat dari tujuan dan ketepatan sasaran agar terwujudnya kemakmuran suatu daerah.<sup>29</sup>

Selain itu, salah satu faktor yang menunjukkan angka kemiskinan adalah tinggi rendahnya nilai dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, PDRB per kapita diperoleh dari hasil pembagian nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, ditahun yang sama. PDRB per kapita menunjukkan gambaran atau rata-rata besaran pendapatan dari setiap individu penduduk pada suatu wilayah.<sup>30</sup> Mahendra dalam penelitiannya menyatakan bahwa PDRB per kapita dapat digunakan sebagai pengukur perekonomian yang lebih baik karena lebih tepat dalam mencerminkan kesejahteraan penduduk suatu daerah dari pada nilai PDRB nya saja.<sup>31</sup> Tingginya tingkat kemiskinan disuatu wilayah, menggambarkan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah data PDRB per kapita provinsi Lampung tahun 2012-2021:

---

<sup>29</sup> Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, "Statistik Keuangan Daerah Provinsi Lampung 2020", diakses pada 17 Februari 2021.

<sup>30</sup> Muktar Redy Susila and Fastha Aulia Pradhani, "Analisis Pengaruh PDRB Per Kapita Dan Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Jumlah Pendapatan Pajak Daerah Provinsi Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan (JIAKu)*, Vol. 1, No. 1, (2022), 167-180.

<sup>31</sup> A Mahendra, "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita, Inflasi Dan Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin", *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, Vol. 1, No. 3, (2017), 113-138.

**Tabel 1.4**  
**PDRB Per kapita Provinsi Lampung**  
**Tahun 2012-2021 (dalam Rupiah)**

Tahun	PDRB Per kapita (Juta Rupiah)
2012	23.910.842
2013	25.768.940
2014	28.755.165
2015	31.153.721
2016	34.053.969
2017	36.998.240
2018	39.864.050
2019	42.172.315
2020	39.346.531
2021	40.950.417

*Sumber: BPS Provinsi Lampung tahun 2012-2021(data diolah)*

Berdasarkan tabel 1.4 di atas, menunjukkan bahwa PDRB per kapita provinsi Lampung tertinggi pada tahun 2019 mencapai angka 42.172.315. Pada tahun 2012 hingga 2019 PDRB per kapita provinsi Lampung selalu menunjukkan angka kenaikan dalam setiap tahunnya, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan, penurunan PDRB per kapita pada tahun 2020 sebesar 2.825.784. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi. PDRB per kapita mencerminkan besarnya suatu pendapatan per kepala masing-masing penduduk suatu wilayah, ketika PDRB per kapita suatu wilayah menunjukkan angka yang tinggi maka dapat disimpulkan bahwa penduduk wilayah tersebut makmur, namun sebaliknya, jika angka PDRB per kapita rendah dapat dikatakan penduduk wilayah tersebut miskin dan tingkat kesejahteraan penduduk rendah.

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan, peneliti tertarik untuk mengukur seberapa besar pengaruh *Foreign Direct Investment* (FDI), pengeluaran pemerintah, dan PDRB per kapita terhadap jumlah penduduk miskin di provinsi Lampung dalam perspektif ekonomi Islam tahun 2012-2021.

### C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Tingkat kemiskinan yang tinggi di provinsi Lampung menandakan kesejahteraan masyarakat relatif rendah. Dalam ekonomi Islam kemiskinan yang tinggi mampu membahayakan akhlak, kelogisan berpikir, keluarga, dan masyarakat.
2. *Foreign Direct Investment* (FDI) provinsi Lampung cenderung mengalami pertumbuhan yang fluktuatif sedangkan investasi asing diperlukan sebagai sumber pembangunan ekonomi dalam mengentas kemiskinan di suatu negara ataupun daerah.
3. Anggaran realisasi pengeluaran pemerintah provinsi Lampung cukup besar namun pengeluaran tersebut lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai dan belanja barang dan jasa dibandingkan untuk belanja kegiatan pembangunan sehingga angka kemiskinan pun masih tinggi.
4. PDRB per kapita provinsi Lampung masih rendah walau menunjukkan tren meningkat dalam hal ini menandakan tingkat kemakmuran masyarakat cenderung relatif rendah sehingga angka kemiskinanpun masih tinggi.

Dari beberapa identifikasi tersebut, untuk menghasilkan penelitian yang lebih fokus, penulis membatasi penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan berkaitan dengan *Foreign Direct Investment* (FDI), pengeluaran pemerintah, dan PDRB per kapita sebagai variabel X (Independen).
2. Jumlah penduduk miskin dalam penelitian ini adalah sebagai variabel Y (dependen).
3. Penelitian ini akan dibahas berdasarkan perspektif ekonomi Islam



#### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan peneliti, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh *Foreign Direct Investment* (FDI) terhadap jumlah penduduk miskin secara parsial di provinsi Lampung tahun 2012-2021?
2. Apakah terdapat pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap jumlah penduduk miskin secara parsial di provinsi Lampung tahun 2012-2021?
3. Apakah terdapat pengaruh PDRB per kapita terhadap jumlah penduduk miskin secara parsial di provinsi Lampung tahun 2012-2021?
4. Apakah terdapat pengaruh *Foreign Direct Investment* (FDI), pengeluaran pemerintah, dan PDRB per kapita secara bersama-sama terhadap jumlah penduduk miskin di provinsi Lampung dalam perspektif ekonomi Islam tahun 2012-2021?

#### E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh variabel *Foreign Direct Investment* (FDI) terhadap jumlah penduduk miskin secara parsial di provinsi Lampung tahun 2012-2021.
2. Untuk mengetahui pengaruh variabel pengeluaran pemerintah terhadap jumlah penduduk miskin secara parsial di provinsi Lampung tahun 2012-2021.
3. Untuk mengetahui pengaruh variabel PDRB per kapita terhadap jumlah penduduk miskin secara parsial di provinsi Lampung tahun 2012-2021.
4. Untuk mengetahui pengaruh variabel *Foreign Direct Investment* (FDI), pengeluaran pemerintah, dan PDRB per kapita secara bersama-sama terhadap jumlah penduduk miskin di provinsi Lampung dalam perspektif ekonomi Islam tahun 2012-2021.

## F. Manfaat Penelitian

Dari setiap penelitian tentunya akan mendapatkan hasil dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini, sebagai berikut:

### 1. Secara Praktis

#### a) Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan serta pengetahuan tentang bagaimana pengaruh variabel *Foreign Direct Investment* (FDI), pengeluaran pemerintah, dan PDRB per kapita terhadap jumlah penduduk miskin dalam perspektif ekonomi Islam.

#### b) Bagi Pihak Lain

Diharapkan agar mampu memberikan informasi yang berguna berkaitan dengan pengentasan kemiskinan di provinsi Lampung sehingga dapat di gunakan sebagai bahan pertimbangan dan pilihan strategi pengambilan kebijakan pemerintah.

### 2. Secara Teoritik

a) Sebagai informasi bagi Mahasiswa/i Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, khususnya Mahasiswa/i yang ingin melakukan penelitian mengenai pengaruh *Foreign Direct Investment* (FDI), pengeluaran pemerintah, dan PDRB per kapita terhadap jumlah penduduk miskin dalam perspektif ekonomi Islam lebih lanjut.

b) Akademisi: penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi bidang keilmuan ekonomi khususnya ekonomi Islam dan dapat dijadikan sebagai tambahan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat bagi pembaca.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat penting guna menjadi acuan dan perbandingan yang memberikan gambaran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu. Untuk itu pada bagian ini akan dijelaskan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan rencana penelitian ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hanifah Safitri dan Muhammad Saleh, dengan judul “Pengaruh Belanja Modal, Belanja NonModal, Penanaman Modal Asing, dan Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap Kemiskinan Kalimantan Selatan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, belanja non modal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan Kalimantan Selatan, Penanaman Modal Asing (PMA/FDI) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kalimantan Selatan.<sup>32</sup>
2. Penelitian yang dilakukan oleh Chyntia Dewi Elviera dan Dedi Irawan, dengan judul “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia, PDRB per kapita memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Utara.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Muhammad Saleh Hanifah Safitri, “Pengaruh Belanja Modal, Belanja Non Modal, Penanaman Modal Asing, Dan Penanaman Modal Dalam Negeri Terhadap Kemiskinan Kalimantan Selatan”, *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, Vol. 3, No. 1, (2020), 229–242.

<sup>33</sup> Chyntia Dewi Elviera and Dedi Irawan, “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Produk Domestik Bruto (PDRB) Terhadap Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara”, *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 3, No. 2, (2020), 103–109.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Pablo Quinonez, dkk, dengan judul “Apakah Investasi Asing Langsung Mengurangi Kemiskinan? Kasus Amerika Latin”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FDI secara langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap pengurangan kemiskinan di Amerika Latin, berbeda dengan stabilitas ekonomi makro, infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia dan pembangunan keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap pengurangan kemiskinan di wilayah tersebut.<sup>34</sup>
  
4. Penelitian yang dilakukan oleh Lufi Supratyoningasih dan Ni Nyoman Yuliarmi, dengan judul “Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah dan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, investasi dan pengeluaran pemerintah memiliki hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan sedangkan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, investasi tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi, sedangkan pengeluaran pemerintah dan tenaga kerja berpengaruh secara tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Pablo Quinonez, Joselin Saenz, and Jessica Solorzano, “Does Foreign Direct Investment Reduce Poverty? The Case of Latin America in the Twenty-First Century”, *Business and Economic Horizons*, Vol. 14, No. 3, (2018), 488–500.

<sup>35</sup> Lufi Supratyoningasih and Ni Nyoman, “Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Bali”, *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, Vol. 11, No. 01, (2022), 1–14.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Muntina Juliana Evita dan Wiwin Priana Primandhana, dengan judul “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia dan Belanja Pemerintah terhadap Kemiskinan di Kabupaten Blora.” Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan sedangkan belanja pemerintah mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Secara bersama-sama ketiga variabel tersebut mempunyai pengaruh signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten Blora.<sup>36</sup>
6. Penelitian yang dilakukan oleh Faradina Anggraini dan Rusdiansyah dengan judul “Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB Per Kapita terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kalimantan Selatan Tahun 2010-2017”. Hasil penelitian variabel IPM dan jumlah penduduk berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di provinsi Kalimantan Selatan, sedangkan variabel PDRB per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di provinsi Kalimantan Selatan.<sup>37</sup>
7. Penelitian yang dilakukan oleh Arman Delis, dkk. dengan judul “Pengaruh FDI terhadap Kemiskinan dan Pengangguran di Indonesia 1993-2013.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata perkembangan FDI selama periode 1993 sampai 2013 adalah 13,84 persen dan jumlah penduduk miskin 1,56 persen dan jumlah pengangguran 8,32 persen, dari hasil regresi menunjukkan bahwa FDI

---

<sup>36</sup> Muntina Juliana Evita and Wiwin Priana Primandhana, “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia Dan Belanja Pemerintah Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Blora”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 10, No. 1, (2022), 79–88.

<sup>37</sup> Faradina Anggraini and Rusdiansyah, “Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB Per Kapita Dan Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Kalimantan Selatan Tahun 2010-2017”, *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, Vol. 2, No. 4, (2019), 893–902.

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin dan FDI berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap jumlah pengangguran.<sup>38</sup>

8. Penelitian yang dilakukan oleh Febby Irma Fajaryani dan Reza Juanda, dengan judul “Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Kemiskinan di Sumatera Utara pada tahun 2006 – 2020”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi investasi dan realisasi belanja pemerintah tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara, dan tenaga kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara. Secara simultan, realisasi investasi, tenaga kerja, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara.<sup>39</sup>

Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di atas adalah memaparkan dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin. Sehingga dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan variabel yang jarang diteliti dan juga dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menggabungkan dan menekankan beberapa variabel yang telah diteliti sebelumnya secara rinci dan lebih mendalam.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dengan menggabungkan *Foreign Direct Investment* (FDI), pengeluaran pemerintah, dan PDRB per kapita yang memengaruhi Jumlah penduduk miskin di provinsi Lampung tahun 2012 hingga 2021 yang akan dibahas secara perspektif ekonomi Islam. Dalam penelitian ini mengambil objek tempat provinsi Lampung dengan mengambil data runtut waktu (*time series*) terbaru, dalam penelitian

---

<sup>38</sup> Arman Delis, Candra Mustika, and Etik Umiyati, “Pengaruh FDI Terhadap Kemiskinan Dan Pengangguran Di Indonesia 1993-2013”, *Jurnal Paradigma Ekonomika*, Vol. 10, No. 1, (2015), 15.

<sup>39</sup> Febby Irma Fazaryani and Reza Juanda, “Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan Di Sumatera Utara Pada Tahun 2006-2020”, *Jurnal Ekonomika Indonesia*, Vol. 11, No. 2, (2022), 30–36.

ini akan dilakukan dengan analisis model regresi linier berganda dengan alat uji menggunakan aplikasi *Eviews 10*, dalam penelitian ini akan dilihat dan dibahas secara perspektif ekonomi Islam dalam masing-masing variabel, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang tidak dijelaskan secara perspektif ekonomi Islam.

Selain itu secara teoritis penelitian ini akan dibahas menggunakan teori lingkaran kemiskinan yang dikemukakan oleh Nurkse yang diasumsikan bahwa kemiskinan terjadi disebabkan oleh kekurangan modal, investasi, pendapatan dan rendahnya tabungan yang mengakibatkan kemunduran dan keterbelakangan.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan bagian yang mencakup uraian ringkasan penulisan pada skripsi ini, maka peneliti membuat sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini menjelaskan terkait penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan kajian penelitian terdahulu yang relevan.

### **BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS**

Pada bab ini berisi teori yang dijelaskan secara rinci sesuai dengan teori yang diambil oleh peneliti, dan diuraikan secara deskriptif terkait *Foreign Direct Investment* (FDI), pengeluaran pemerintah, PDRB per kapita, jumlah penduduk miskin, dan dijelaskan secara perspektif ekonomi Islam. Kemudian terdapat kerangka pemikiran, dan pengajuan hipotesis.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisi waktu dan pelaksanaan penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, jenis dan sumber data, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, uji prasarat analisis, dan uji hipotesis.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi pembahasan hasil penelitian.

#### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini terdapat simpulan akhir dari penelitian, serta rekomendasi.

#### **DAFTAR RUJUKAN**

Pada bagian ini berisi rujukan-rujukan yang telah digunakan peneliti untuk penelitian ini.

#### **LAMPIRAN**

Pada bagian ini berisi dokumen pendukung yang digunakan dalam proses penelitian.





## BAB II

### LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

#### A. Landasan Teori

##### 1. Konsep Kemiskinan

###### a. Definisi Kemiskinan

Berdasarkan teori lingkaran kemiskinan yang dikemukakan oleh Nurske, penyebab kemiskinan, *pertama*, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. *Kedua*, kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia, rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang di terima, kemudian akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya. *Ketiga*, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses ke modal.<sup>40</sup>

Menurut Shirazi dan Bramanik dalam Syauqi, kemiskinan juga diartikan sebagai situasi yang dihadapi seseorang dalam keadaan tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara ekonomi, sosial dan psikologis dimensi rohani.<sup>41</sup> Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan dan non pangan.<sup>42</sup>

Menurut Friedman dalam Machmud, kemiskinan adalah ketidaksamaan kesempatan untuk memformulasikan kekuasaan sosial berupa aset, sumber keuangan, organisasi sosial politik, jaringan sosial, barang atau jasa, pengetahuan dan keterampilan, serta informasi.<sup>43</sup>

---

<sup>40</sup> Amir Machmud, *Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Erlangga, 2016), 284-285.

<sup>41</sup> Irfan Syauqi, *Ekonomi Pembangunan Syariah Edisi Revisi*, (Jakarta: Gramedia, 2016), 68.

<sup>42</sup> Badan Pusat Statistik (BPS), "Kemiskinan", diakses pada tanggal 08 Maret 2023 [https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view\\_data/0000/data/184/sdgs\\_1/1](https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/184/sdgs_1/1).

<sup>43</sup> *Ibid.*..., 281.

Menurut Machmud, kemiskinan merupakan keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global, di mana sebagian orang memahami istilah ini secara subjektif dan komparatif, sementara yang lain melihatnya dari segi moral dan evaluatif, serta sebagian lainnya memahaminya dari sudut pandang ilmiah yang telah mapan.<sup>44</sup>

Menurut *World Bank*, kemiskinan adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak dapat merasakan segala macam pilihan dan kesempatan untuk memenuhi kebutuhan primernya, karena tidak dapat memenuhi kesehatannya sendiri, kehidupan yang baik, kebebasan, harga diri, dan perasaan dihormati.<sup>45</sup>

Kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Dalam arti sempit, kemiskinan (*proper*) dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, Chambers mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu konsep terpadu (*intergrated concept*) yang memiliki lima dimensi, yaitu, kemiskinan (*proper*), ketidakberdayaan (*powerless*), kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), ketergantungan (*dependence*), dan keterasingan (*isolation*).<sup>46</sup> Kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin perlindungan kehidupan. Salah satu penyebab kemiskinan adalah kurangnya pendapatan dan aset (*lack of income and assets*)

---

<sup>44</sup> Amir Machmud, *Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi...*, 282.

<sup>45</sup> World Bank, "Poverty", <https://data.worldbank.org/>.

<sup>46</sup> Amir Machmud, *Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Erlangga, 2016), 280-281.

untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan dan tingkat kesehatan serta pendidikan yang dapat diterima (*acceptable*).<sup>47</sup>

Berdasarkan definisi para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah suatu keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, kemiskinan merupakan gambaran kekurangan dari segala sisi aspek kehidupan, baik dari sisi materi dan sisi non materi, kurangnya kebutuhan sosial dan ekonomi, serta akses terhadap sumber-sumber lainnya.

Negara-negara berkembang masih berjuang untuk mengelola pertumbuhan ekonomi untuk negaranya agar lebih maju. Ketika mereka tidak bisa menangani permasalahan pembangunan ekonomi, maka mungkin ada kecenderungan kekurangan modal, diikuti oleh produktivitas yang rendah, pendapatan riil turun, tabungan rendah, dan investasi melambat, lalu terulang kembali dalam keadaan kekurangan modal dan seterusnya akan berputar. Oleh karena itu, setiap usaha harus berjuang untuk memutus siklus dan perangkap kemiskinan ini.

#### b. Bentuk-bentuk Kemiskinan

Menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Kemiskinan secara konseptual dibedakan menjadi kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif, yang perbedaannya terletak pada standar penilaiannya. Kemiskinan relatif akan bergantung pada unsur subjektif masyarakat setempat. Sementara kemiskinan absolut sangat bergantung pada penetapan standar kebutuhan dasar, baik makanan maupun bukan makanan. Penjelasan lebih rinci sebagai berikut:<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Azizah and Kusuma, "Pengaruh Pendidikan, Pendapatan Perkapita Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur"..., 167-180.

<sup>48</sup> Ardi Adj and dkk, *Pengukuran Garis Kemiskinan Di Indonesia: Tinjauan Teoritis Dan Usulan Perbaikan Jakarta: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) 2020*, 10.

### 1) Kemiskinan Absolut

Hampir semua negara berkembang, penghitungan kemiskinan cenderung menggunakan pendekatan absolut. Konsep kemiskinan absolut terkait dengan standar hidup minimum yang dianggap layak disuatu daerah tertentu pada waktu tertentu. Dalam pengertian ini, jika kehidupannya dianggap di bawah taraf hidup yang layak, ia disebut miskin. Jika seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum seperti makanan, pakaian, kesehatan, tempat tinggal dan pendidikan, yang diperlukan untuk kehidupan yang layak dan pekerjaan yang optimal, dia disebut miskin dengan konsep kemiskinan absolut. Kebutuhan dasar minimal biasanya diartikan kedalam istilah finansial, dengan mempertimbangkan banyak dimensi yang harus dipenuhi untuk menggambarkan kehidupan yang layak.<sup>49</sup>

Bank dunia mendefinisikan kemiskinan absolut sebagai hidup dengan pendapatan dibawah US\$1/hari dan kemiskinan menengah dengan pendapatan di bawah US\$2/hari. US\$ 1 per kapita/hari di mana diperkirakan ada sekitar 1,2 miliar penduduk dunia yang hidup di bawah ukuran tersebut, kemudian untuk US\$ 2 per kapita/hari di mana lebih dari 2 miliar penduduk yang hidup kurang dari batas tersebut. US dollar yang digunakan adalah US\$ PPP (*Purchasing Power Parity*), bukan nilai tukar resmi (*exchange rate*). Kedua batas ini adalah garis kemiskinan absolut.<sup>50</sup>

Garis kemiskinan absolut adalah nilai nominal yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar, yang meliputi kelompok makanan dan kelompok bukan makanan. Kemiskinan, menurut pendekatan kemiskinan absolut, akan turun ketika seluruh

---

<sup>49</sup> *Ibid...*, 10.

<sup>50</sup> Amir Machmud, *Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi...*, 286.

penduduk dalam satu daerah mengalami peningkatan pendapatan pada tingkat yang sama. Kondisi ini biasa dikenal sebagai pertumbuhan yang memiliki dampak netral pada ketimpangan (*inequality-neutral growth*).<sup>51</sup>

## 2) Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif diartikan sebagai kondisi masyarakat karena kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pendapatan.<sup>52</sup> Kemiskinan relatif berhubungan dengan anggota komunitas kelas menengah dari komunitas terminim. Jika kesepakatan tercapai, garis kemiskinan dapat ditetapkan. Misalnya, 20 persen kelompok terbawah diurutkan berdasarkan pendapatan atau *output*. Garis kemiskinan relatif tidak bisa dipakai untuk membandingkan tingkat kemiskinan antardaerah dan antarwaktu karena tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan yang sama. Namun untuk menentukan sasaran program yang ditujukan untuk penduduk miskin, ukuran kemiskinan relatif bisa digunakan. Indikator untuk menentukan kemiskinan relatif biasanya mencantumkan dua informasi, yakni informasi kuantitatif yang mencerminkan distribusi dan informasi distribusi itu sendiri. Contohnya, 60 persen dari nilai tengah pendapatan masyarakat dan 40 persen penduduk dengan tingkat kesejahteraan terbawah.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Adji and dkk, *Pengukuran Garis Kemiskinan Di Indonesia: Tinjauan Teoritis Dan Usulan Perbaikan...*, 9.

<sup>52</sup> Amir Machmud, *Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi...*, 287.

<sup>53</sup> Adji and dkk, *Pengukuran Garis Kemiskinan Di Indonesia: Tinjauan Teoritis Dan Usulan Perbaikan...*, 10.

### c. Indikator Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep ini mengacu pada *Handbook on Poverty and Inequality* yang diterbitkan oleh *World Bank*. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik Indikator kemiskinan diukur melalui sebagai berikut:<sup>54</sup>

- 1) Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).
- 2) Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur, susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).
- 3) Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan non-makanan berupa perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi

---

<sup>54</sup>Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, “Kemiskinan Dan Ketimpangan”, <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>, 2023, diakses pada tanggal 17 Februari 2023.

kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.

Garis Kemiskinan (GK) adalah persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan, yang secara sederhana mengukur proporsi penduduk yang dikategorikan miskin. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep ini tidak hanya digunakan oleh BPS, tetapi juga oleh negara-negara lain seperti Armenia, Senegal, Pakistan, Bangladesh, Vietnam, Sierra Leone, dan Gambia. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan yang diukur dari sisi pengeluaran yang dikonseptualisasikan dengan Garis Kemiskinan (GK).<sup>55</sup> Berikut merupakan rumus perhitungannya:

$$GK = GKM + GKNM$$

Keterangan:

GK = Garis Kemiskinan

GKM = Garis Kemiskinan Makanan

GKNM = Garis Kemiskinan Non Makanan

Foster dkk dalam Tambunan juga, memperkenalkan tiga indikator untuk mengukur kemiskinan, yaitu:<sup>56</sup>

- 1) *The incidence of poverty* yaitu persentase dari populasi yang hidup didalam keluarga dengan pengeluaran konsumsi per kapita di bawah garis kemiskinan.
- 2) *The depth of poverty* yang menggambarkan dalamnya kemiskinan disuatu wilayah yang diukur dengan Indeks Jarak Kemiskinan (IJK), atau dikenal dengan

<sup>55</sup> Amir Machmud, *Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi...*, 288.

<sup>56</sup> Tulus Tambunan, *Pembangunan Ekonomi Inklusif*, (Jakarta: LP3ES, 2016), 96-97.

sebutan *Poverty Gap Indeks*. Indeks ini mengestimasi jarak atau perbedaan rata-rata pendapatan orang miskin dan garis kemiskinan sebagai suatu proporsi dari garis tersebut.

- 3) *The severity of poverty* yang diukur dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (IKK), indeks ini pada prinsipnya sama saja dengan IJK, namun, selain mengukur jarak yang memisahkan orang miskin dari garis kemiskinan, IKK juga mengukur ketimpangan diantara penduduk miskin atau penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks ini juga sering disebut dengan *distributionally sensitive indeks* yang dapat digunakan untuk mengetahui intensitas kemiskinan.

#### d. Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan

Faktor penyebab kemiskinan menurut Suharto dalam Machmud, dapat dibagi dalam empat Mazhab, yaitu:<sup>57</sup>

- 1) *Individual Explanation*. Diakibatkan oleh karakteristik orang miskin itu sendiri: malas, pilihan yang salah, gagal dalam bekerja, cacat bawaan, belum siap memiliki anak, dan sebagainya.
- 2) *Familial Explanation*. Akibat faktor keturunan, di mana antargenerasi terjadi ketidakberuntungan yang berulang, terutama akibat pendidikan.
- 3) *Subcultural Explanation*. Akibat karakteristik perilaku suatu lingkungan yang berakibat pada moral masyarakat.
- 4) *Structural Explanation*. Menganggap kemiskinan sebagai produk dari masyarakat yang menciptakan ketidakseimbangan dengan perbedaan status atau hak.

---

<sup>57</sup> Amir Machmud, *Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi...*, 285.



Faktor penyebab kemiskinan menurut Bank Dunia sebagai berikut:<sup>58</sup>

- 1) Terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar dan prasarana.
- 2) Kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor.
- 3) Adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung.
- 4) Adanya perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan di antara sektor ekonomi (ekonomi tradisional versus ekonomi modern).
- 5) Rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat.
- 6) Budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkungannya.
- 7) Tidak adanya tata kelola yang bersih dan baik (*good governance*).
- 8) Pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan.

Faktor-faktor penentu ketimpangan dan kemiskinan:<sup>59</sup>

- 1) Tingkat Pendidikan

Hasil penelitian Cameron tentang kemiskinan menyimpulkan bahwa pengurangan kemiskinan diasosiasikan dengan meningkatnya pencapaian pendidikan dan peningkatan pendapatan dari tenaga kerja terdidik. Hasil penelitian Sukherman juga menunjukkan kemiskinan dipengaruhi oleh besarnya persentase angka melek huruf.

---

<sup>58</sup> *Ibid...*, 285-286.

<sup>59</sup> *Ibid...*, 283-284.

## 2) Pendapatan Per Kapita Penduduk

Hasil penelitian Iradian yang dilakukan pada 82 negara untuk tahun 1965-2003 menunjukkan bahwa tingginya pertumbuhan pendapatan per kapita tidak akan terlalu berdampak apabila tidak disertai dengan perbaikan distribusi pendapatan. Perubahan pendapatan per kapita mempunyai pengaruh yang negatif terhadap kemiskinan. Hasil penelitian ini mengisyaratkan bahwa peningkatan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai oleh Indonesia hanya dinikmati oleh sebagian kecil penduduk. Sementara itu, sebagian besar penduduk yang saat ini hidup dalam kemiskinan tidak menikmati pencapaian tersebut. Dengan kata lain, meskipun ekonomi tumbuh dengan baik, tetapi mereka tetap berada dalam kemiskinan. Peningkatan kontra prestasi (gaji, honor, upah, dan bentuk lain) yang selama ini terjadi di Indonesia hanya dinikmati oleh sebagian orang. Peningkatan kontra prestasi tersebut tidak sampai menyentuh kelompok yang berada pada garis kemiskinan.

## 3) Rasio Ketergantungan Penduduk

Faktor penyebab munculnya rasio ketergantungan adalah adanya tingkat kelahiran (fertilitas) yang tinggi. World Bank menyatakan bahwa penyebab kemiskinan adalah adanya ledakan penduduk (*population growth*) yang tidak terkendali karena hal itu akan menyebabkan rasio ketergantungan (*dependency ratio*) yang tinggi. Sementara itu, Malthus dalam Todaro menyatakan bahwa ledakan penduduk akan menimbulkan pola hidup yang serba pas-pasan (subsisten). Sedangkan pemikiran neo-Malthus menyatakan bahwa bangsa-bangsa yang miskin tidak akan pernah berhasil mencapai taraf hidup yang lebih tinggi dari tingkat

subsisten, kecuali bangsa itu mengadakan pemeriksaan preventif (*preventive checks*) terhadap pertumbuhan populasinya, atau dengan menerapkan pengendalian kelahiran.

#### 4) Pertumbuhan Ekonomi (GRW)

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang selama ini dicapai oleh Indonesia ternyata tidak mampu mengurangi faktor penyebab kemiskinan. Pesatnya pertumbuhan ekonomi tersebut hanya bisa dinikmati oleh sebagian kecil orang di Indonesia. Hal itu akan menimbulkan kemiskinan struktural di mana pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya bisa dinikmati oleh sebagian kecil orang kaya, sementara sebagian besar masyarakat tetap miskin. Keadaan ini sesuai dengan teori "trade-off between growth and equity" yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menimbulkan ketimpangan yang semakin besar dalam pembagian pendapatan, atau semakin tidak merata, dan sebaliknya upaya pemerataan dapat terwujud dalam pertumbuhan ekonomi yang rendah.

#### 5) Persentase Tenaga Kerja Di Sektor Pertanian (TKP)

Penelitian Ritonga juga menyatakan bahwa penduduk miskin di Indonesia umumnya bekerja di sektor pertanian dan mempunyai tingkat pendidikan SD ke bawah. Karena itu, program pengentasan kemiskinan disektor pertanian perlu diprioritaskan. Pembangunan sektor pertanian melalui revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan, serta pembangunan masyarakat pedesaan perlu menjadi pijakan demi membawa masyarakat Indonesia keluar dari permasalahan kemiskinan.

#### 6) Persentase Tenaga Kerja Di Sektor Industri (TKI)

Peran penting sektor industri dalam mengurangi faktor penyebab kemiskinan salah satunya ditunjukkan oleh hasil penelitian Skoufias, yang menyatakan bahwa konsumsi tenaga kerja di sektor industri lebih besar dari konsumsi tenaga kerja sektor pertanian. Hal ini mengindikasikan bahwa pendapatan pekerja usaha kecil yang bekerja di sektor industri non-pertanian lebih besar daripada penghasilan tenaga kerja usaha kecil yang bekerja di sektor industri yang bergerak di sektor pertanian.

#### e. Teori Penyebab Kemiskinan

Teori lingkaran kemiskinan yang dikemukakan oleh Nurkse dipandang dari sisi ekonomi, yang digambarkan sebagai berikut:<sup>60</sup>



**Gambar 2.1 Lingkaran Setan Kemiskinan**  
(*The Vicious Circle of Poverty*)

Berdasarkan teori lingkaran kemiskinan gambar 2.1, dapat dijelaskan penyebab kemiskinan yaitu:

- 1) Secara mikro kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang

<sup>60</sup> Amir Machmud, *Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi*, 284-285.

menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah.

2) Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan.

3) Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses ke modal.

Negara-negara berkembang masih berjuang untuk mengelola pertumbuhan ekonomi untuk negaranya agar lebih maju. Ketika mereka tidak bisa menangani permasalahan pembangunan ekonomi, maka mungkin ada kecenderungan kekurangan modal, diikuti oleh produktivitas yang rendah, pendapatan riil turun, tabungan rendah, dan investasi melambat, lalu terulang kembali dalam keadaan kekurangan modal dan seterusnya akan berputar. Oleh karena itu, setiap usaha harus berjuang untuk memutus siklus dan perangkap kemiskinan ini.

#### f. Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Menurut Al-Ghazali dalam Huda, mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Kemudian Al-Ghazali membagi kemiskinan menjadi dua bagian yakni, kemiskinan dalam kaitannya dengan kebutuhan material dan kemiskinan dalam kaitannya dengan kebutuhan spiritual.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam...*, 23.

Kemiskinan menggambarkan suatu kondisi ketiadaan kepemilikan dan rendahnya pendapatan atau suatu kondisi tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar manusia.<sup>62</sup> Kebutuhan dasar manusia disini adalah kebutuhan makanan dan non makanan. Islam memandang kemiskinan sebagai musibah dan bencana yang seharusnya memohon perlindungan kepada Allah atas kejahatan yang tersembunyi di dalamnya. Jika kemiskinan ini semakin merajalela, maka kemiskinan ini akan membuat lupa adanya Allah dan juga rasa sosialnya kepada sesama. Rasulullah Saw. menjelaskan bagaimana bahayanya kemiskinan (kefakiran), bahkan beliau menggambarkan bahwasanya kefakiran mendekati kekufuran.<sup>63</sup>

Menurut Manawy dalam Huda, kekafiran dan kekufuran mempunyai keterkaitan yang sangat kuat, karena kekufuran merupakan satu langkah menuju kekafiran. Seorang yang fakir miskin, pada umumnya akan menyimpan kedengkian kepada orang yang mampu dan kaya. Adapun iri dan dengki akan mampu melenyapkan kebaikan. Mereka pun mulai menumbuhkan kehinaan di dalam hati mereka, di saat mereka mulai melancarkan segala daya upayanya demi mencapai tujuan kedengkian mereka tersebut. Semuanya ini mampu meniadai agamanya dan juga menimbulkan adanya ketidakridhaan atas takdir yang telah ditetapkan yang akhirnya tanpa sadar akan membuatnya mencela rezeki yang telah datang padanya. Meskipun ini semua belum termasuk ke dalam kekafiran, namun sudah merupakan langkah untuk mencapai kekafiran itu sendiri.<sup>64</sup>

Menurut Qardhawi dalam Huda, Islam memandang kemiskinan merupakan satu hal yang mampu membahayakan akhlak, kelogisan berpikir, keluarga, dan juga masyarakat. Islam pun memanggapnya sebagai musibah dan bencana yang

---

<sup>62</sup> Ardito Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 9.

<sup>63</sup> Edwin, "Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Politik Islam.", 169-188.

<sup>64</sup> Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam*, 24-25.

seharusnya memohon perlindungan kepada Allah atas kejahatan yang tersembunyi di dalamnya.<sup>65</sup> Dalam hal ini Islam melarang kepada umatnya untuk meninggalkan keluarganya, kerabatnya dalam keadaan lemah dan miskin sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. An -Nisa' ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا  
أَقْوَلًا سَدِيدًا ٩

Artinya: “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah (miskin) dibelakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar” (Q.S An-Nisa' (4):9)

Kandungan ayat di atas ialah, Ali Ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ayat ini berkenaan dengan seorang lelaki yang sedang rnenjelang ajalnya, lalu kedengaran oleh seorang lelaki bahwa dia mengucapkan suatu wasiat yang menimbulkan mudarat terhadap ahli warisnya. Maka Allah Swt. memerintahkan kepada orang yang mendengar wasiat tersebut. hendaknya ia bertakwa kepada Allah, membimbing si sakit serta meluruskannya ke jalan yang benar. Hendaknya si sakit memandang kepada keadaan para ahli warisnya. sebagaimana diwajibkan baginya berbuat sesuatu untuk ahli warisnya, bila dikhawatirkan mereka akan terlunta-lunta. Maksud ayat ini, jika kerabat karib yang miskin dan tidak berhak mendapat pusaka, anak-anak yatim, dan orang-orang yang miskin melihat pembagian pusaka yang banyak, tentu mereka pun ingin mengambil sesuatu dari harta itu, jika mereka melihat si fulan dan si fulan mengambil fulan, sedang mereka sangat memerlukan dan tidak mendapat bagian sedikit pun darinya, maka Allah Swt. menyuruh

<sup>65</sup> *Ibid...*, 24.

kepada ahli waris agar memberikan sesuatu dari bagiannya sebagai kebaikan, sedekah, dan kebajikan untuk mereka sebagai penawar atas kedukaan hatinya.<sup>66</sup>

Kewajiban membantu masyarakat miskin untuk lepas dari kemiskinannya adalah tugas kita semua sebagai umat Islam. Agama Islam bukan hanya mengajarkan bagaimana menjalin hubungan dengan sang *khalik* (*hablum-minallah*) tetapi juga mengatur hubungan dengan sesama manusia (*hablum-minannas*).<sup>67</sup>

Selanjutnya model pembangunan yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun dalam upaya pengentasan kemiskinan, dengan cara menekan struktur institusi ekonomi pembangunan Islam, bahwa proses pembangunan perlu didukung berbagai pihak, baik organisasi maupun instansi dalam sebuah entitas ekonomi. Secara matematis model ini dapat dirumuskan sebagai berikut.<sup>68</sup>

$$G = f(S, N, W, j \text{ dan } g)$$

- G : Negara (*The State*)  
 S : Institusi/Syariah (*Institutions/Sharia*)  
 N : Sumber daya insani (*Human Beings*)  
 W : Kekayaan (*Wealth*)  
 j : Keadilan (*Justice*)  
 g : Pembangunan (*Development*)

Model matematis ini hanyalah salah satu model matematis yang dapat dibentuk dari hasil pemikiran Ibnu Khaldun. Penjelasan secara detail akan dijelaskan sebagai berikut:<sup>69</sup>

<sup>66</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 654-656.

<sup>67</sup> Muhammad Istan, "Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Perspektif Islam", *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, Vol. 2, No. 1, (2017), 81.

<sup>68</sup> Mahri, A. Jajang W, Cupian and dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021), 127.

<sup>69</sup> *Ibid*..., 128.



### 1) Negara (*The State*)

Ibnu Khaldun menekankan bahwa orang yang memegang kedaulatan harus memiliki semua sifat kebaikan yang dituntut oleh agama dan politik. Ia harus toleran, moderat, dan adil, serta harus menghindari kelicikan, kecurangan, dan kepalsuan. Ia juga dituntut harus memenuhi semua kewajibannya, kontrak-kontrak, dan perjanjian-perjanjian, mudah ditemui rakyat, menyimak keluhan mereka, menghapus kesulitan mereka, memenuhi kebutuhan pokok terutama terhadap golongan miskin, serta menghapuskan ketidakadilan dan penindasan.

### 2) Institusi/Syariah (*Institutions/Sharia*)

Institusi atau yang disebut juga syariah membantu masyarakat menanamkan kualitas kebaikan seperti ketaatan, kejujuran, integritas, kesederhanaan, dan perasaan kebersamaan yang dapat memberikan kontribusi terhadap proses pembangunan, keadilan, saling pengertian, kerja sama, kedamaian, dan keharmonisan sosial serta mengontrol tingkah laku yang dapat membahayakan masyarakat. Syariah dapat menggunakan pengaruh moderatnya terhadap penggunaan sumber daya, dengan demikian syariah dapat memberikan kontribusi terhadap keseimbangan sumber daya. Syariah mengacu pada nilai-nilai dan lembaga atau aturan perilaku yang membuat masyarakat bersedia untuk memenuhi kewajiban mereka terhadap sesama dan mencegah perilaku sosial yang menyimpang. Aturan ini bisa berbentuk formal maupun informal, tertulis atau tidak tertulis.

### 3) Sumber Daya Insani (*Human Beings*)

Dalam analisisnya Ibnu Khaldun sangat menitikberatkan pada peran manusia. Manusia memiliki peranan penting dalam dinamika peradaban. Manusia adalah tujuan dan alat pembangunan. Sebagai tujuan pembangunan, kesejahteraan ditujukan bagi manusia. Ketika kesejahteraan telah terpenuhi maka manusia akan dapat bekerja secara efektif dan kreatif. Sedangkan sebagai alat pembangunan, manusia merupakan subjeknya yang bekerja untuk membangun. Manusia adalah input, manusia membentuk pemerintahan, keluarga, dan masyarakat.

### 4) Kekayaan (*Wealth*)

Ibnu Khaldun menekankan peran investasi seraya menyatakan “Dan ketahuilah bahwa kekayaan tidak tumbuh manakala ditimbun dan disimpan. Ia akan tumbuh dan berkembang manakala dibelanjakan untuk kepentingan masyarakat, untuk diberikan kepada yang berhak, dan menghapuskan kesulitan”. Faktor-faktor yang menjadi katalisator adalah laju pajak yang rendah, keamanan kehidupan dan hak milik, serta lingkungan fisik yang sehat.

### 5) Keadilan (*Justice*)

Pembangunan tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa unsur keadilan. Keadilan yang dimaksud adalah tidak dipandang dalam arti ekonomi yang sempit, tetapi dalam arti yang lebih komprehensif. Keadilan dalam semua sektor kehidupan manusia. Selanjutnya keadilan yang holistik komprehensif ini tidak akan dapat dicapai tanpa masyarakat yang peduli. Keadilan melalui persaudaraan dan persamaan sosial, menjamin keamanan kehidupan, hak-hak milik dan penghormatan kepada martabat orang lain,

pemenuhan secara jujur kewajiban politik dan sosial ekonomi, upah yang adil bagi siapa saja yang telah bekerja serta pencegahan kezaliman kepada siapapun dalam bentuk apapun.

#### 6) Pembangunan (*Development*)

Pembangunan di dalam model Ibnu Khaldun tidak hanya mengacu kepada pertumbuhan ekonomi saja. Pembangunan meliputi semua aspek pembangunan manusia sehingga masing-masing variabel memperkaya variabel lain dan pada akhirnya akan memberikan kontribusi pada kesejahteraan atau kebahagiaan hakiki manusia.

Kemiskinan juga menjadi bagian dari tanggung jawab keluarga. Ada tanggung jawab kolektif dalam suatu keluarga manakala ada bagian dari anggota keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi. Seorang anak berhak mendapat penghidupan dan pengayoman yang layak dari kedua orang tuanya. Demikian juga sebaliknya anak berkewajiban membantu dan menyantuni orang tuanya yang sudah tua, sehingga ada mekanisme *preventif* untuk mencegah terjadinya kemiskinan dalam suatu keluarga. Lingkup tanggung jawab dalam keluarga dapat melebar secara vertikal dari mulai kakek sampai ke cucu. Demikian juga dapat melebar ke samping yaitu saudara kandung, sepupu, dan seterusnya, sehingga ada perlindungan yang otomatis terhadap kehidupan dalam suatu keluarga. Sehingga menjadi tanggung jawab dalam setiap keluarga bagaimana membina dan menyiapkan semua anggota keluarganya agar menjadi manusia yang berilmu, berakhlak, berketerampilan, punya semangat dan cita-cita yang tinggi agar hidupnya menjadi manusia yang utama di dunia dan akhirat.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Imamudin Yuliadi, *Teori Ekonomi Makro Islam*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), 241-242.

Pengentasan kemiskinan juga menjadi tanggung jawab dalam masyarakat di mana masyarakat harus memberi kesempatan, dukungan moral dan spiritual, dan fasilitas bagi tumbuhnya semangat kewirausahaan di kalangan remaja dan pemuda. Memberi kesempatan dan dukungan positif bagi munculnya ide-ide kreatif dan positif dari kalangan generasi muda apa pun bentuknya. Dan sebaliknya harus mengingatkan, menegur, memberi sanksi sosial pada setiap kegiatan, aksi, perilaku negatif dan menyimpang yang menimbulkan kerusakan dan keresahan di tengah masyarakat seperti narkoba, pergaulan bebas, *vandalisme*, perkelahian pelajar, dan sebagainya. Fasilitas untuk menyalurkan energi dan minat bakat dapat disediakan misalnya di kampung, di masjid, taman kota, dalam bentuk sanggar belajar, kelompok pecinta alam, kelompok bina usaha, dan sebagainya.<sup>71</sup>

## 2. Konsep *Foreign Direct Investment* (FDI)

### a. Definisi *Foreign Direct Investment* (FDI)

Menurut Karya, investasi merupakan suatu bentuk pengorbanan kekayaan di masa sekarang untuk mendapatkan keuntungan di masa depan dengan tingkat risiko tertentu. Secara umum, dalam teori ekonomi, investasi berarti pembelian barang produksi dari modal. Barang produksi yang dimaksud adalah barang yang tidak dikonsumsi, tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang. Contohnya membangun pabrik, pembukaan lahan perkebunan hingga penanaman dan pembelian kendaraan truk untuk angkutan barang dan sebagainya.<sup>72</sup>

*Foreign Direct Investment* (FDI) atau Penanaman Modal Asing merupakan bentuk investasi dengan membangun, membeli total atau mengakui sisi perusahaan. FDI sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan Penanaman Modal

<sup>71</sup> *Ibid...*, 242.

<sup>72</sup> Karya and Syamsuddin, *Makro Ekonomi Pengantar Untuk Manajemen*, 72.

Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.<sup>73</sup>

FDI terjadi ketika sebuah perusahaan dari suatu negara menanamkan modalnya dalam jangka waktu panjang ke sebuah perusahaan di negara lain.<sup>74</sup> Investasi Asing Langsung (*Foreign Direct Investment*), berarti perusahaan dari negara penanam modal secara *the facto* atau *the jure* melakukan pengawasan atas aset aktiva yang ditanamkan di negara pengimpor modal dengan cara investasi.<sup>75</sup>

#### b. Syarat Penanaman Modal Asing (PMA/FDI)

Syarat investor dalam melakukan *Foreign Direct Investment* (FDI), sebagai berikut:<sup>76</sup>

- 1) Bagi investor asing yang hendak menanamkan modalnya di Indonesia, harus mendirikan perusahaan berdasarkan bidang usaha yang tercantum dalam KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia), yakni sektor prioritas investasi, yaitu infrastruktur, agrikultur, industri, maritim, pariwisata, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri, serta ekonomi digital. Sektor-sektor ini sangat terbuka untuk Penanaman Modal Asing (*Foreign Direct Investment*/FDI) tentunya dengan memperhatikan pedoman investasi yang tercantum dalam Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang

---

<sup>73</sup> Windhu Putra, *Perekonomian Indonesia Penerapan Beberapa Teori Ekonomi Pembangunan Di Indonesia*, 124.

<sup>74</sup> Delis, Mustika, and Umiyati, "Pengaruh FDI Terhadap Kemiskinan Dan Pengangguran Di Indonesia 1993-2013", 15.

<sup>75</sup> Amir Machmud, *Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi*, 101.

<sup>76</sup> Kementerian Investasi BKPM, "Penanaman Modal Asing Di Indonesia", <https://www.investindonesia.go.id/id>, 2023.

Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

- 2) Perusahaan asing ini berbentuk PT (Perseroan Terbatas) yang dimiliki oleh setidaknya dua pemegang saham, baik itu perorangan atau perusahaan.
- 3) Nilai minimum investasi asing di Indonesia adalah Rp 10 miliar (tidak termasuk harga tanah dan bangunan).

c. Bentuk-bentuk *Foreign Direct Investment* (FDI)

Menurut Machmud Investasi Asing langsung dapat mengambil beberapa bentuk, seperti pembentukan cabang perusahaan di negara pengimpor modal; pembentukan perusahaan di mana perusahaan dari negara penanam modal memiliki mayoritas saham; pembentukan perusahaan di negara pengimpor yang semata-mata dibiayai oleh perusahaan yang berlokasi di negara penanam modal; pembentukan perusahaan di negara penanam modal untuk secara khusus beroperasi di negara lain; atau menaruh aset (aktiva) tetap di negara lain oleh perusahaan nasional dari penanam modal.<sup>77</sup>

Berikut beberapa perusahaan penanaman modal asing di Indonesia, diantaranya sebagai berikut:<sup>78</sup>

- 1) Unilever  
Perusahaan dari Belanda yang telah hadir di lebih dari 100 negara. Berdiri pada tahun 1930an
- 2) HM Sampoerna  
Didirikan oleh Liem Seeng Tee yang merupakan imigran Indonesia-Cina pada tahun 1913 ini, 97% sahamnya dikuasai Philip Moris Internasional.
- 3) Astra International  
Bergerak di banyak bidang yang tidak terbatas hanya

<sup>77</sup> Amir Machmud, *Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi*, 101.

<sup>78</sup> Pradana Cahaya Nasional, "Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Indonesia", <https://pcn.or.id/pma/>, 2023.

pada industri otomotif, layanan keuangan, infrastruktur, dan informasi teknologi.

4) Google

Kantor pusat Google di Asia berada di Singapura ini memiliki kantor cabang di Kebayoran Baru, Jakarta.

5) Marriott International

Perusahaan perhotelan yang terkenal dan sudah memiliki cabang di lebih dari 100 negara.

6) Maybank

Perusahaan Malaysia ini satu bank terbesar dalam hal kapitalisasi pasar dan aset di Asia Tenggara. Sudah ada di lebih dari 20 negara.

7) Medco Energi

MedcoEnergi bergerak di industri minyak dan gas.

8) Toyota

Perusahaan ini telah melakukan investasi sebesar \$15 miliar hingga 2019.

9) L'Oreal

Perusahaan kosmetik yang terkenal ini bepusat di Clichy, Perancis. Terdapat dua divisi L'Oreal yang beroperasi di Indonesia: yang pertama dibidang marketing dan distribusi dan yang kedua bergerak dibidang manufaktur.

10) Exxon Mobil

Perusahaan multinasional Amerika yang telah berdiri di Indonesia lebih dari 100 tahun ini bergerak di Industri Minyak dan Gas.

Jenis investasi yang masuk ke provinsi Lampung, menurut Kepala Dinas Perindustrian provinsi Lampung sesuai dengan target ialah dalam bentuk agroindustri, sehingga mampu mendukung pertanian Lampung dan margin yang dihasilkan dari perputaran investasi itu dapat mendukung makro ekonomi Lampung. Pada tahun 2017, 60-70% industri Lampung berbasis agroindustri, beberapa investasi asing yang masuk itu industri ubi kayu, tapioka,

glukosa, pengering jagung, pakan ternak, industri mie, dan gula pasir. Selain membuka lapangan kerja, peningkatan investasi ini akan memodernisasi industri, pasalnya rata-rata industri Lampung tertinggal dari sisi teknologi, dengan adanya investasi ini akan menjadikan industri lebih efisien sehingga mampu bersaing di pasar nasional dan global.<sup>79</sup>

Proyek investasi asing di provinsi Lampung pada tahun 2023 menurut Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), yaitu proyek investasi tersebut diantaranya Bakauheni Harbour City, Agripark Bandar Lampung, Geothermal Way Ratai, Kawasan Industri Tanggamus dan Waste to Energy TPA Bakung dan beberapa proyek investasi yang *Clean and Clear* yang telah dipromosikan dan berhasil, diantaranya Kawasan Terintegrasi Bakauheni, Waste to Energy TPA Bakung dan Way Laga Bizpark.<sup>80</sup>

#### d. Manfaat *Foreign Direct Investment* (FDI)

Menurut Kementerian investasi atau sering disebut dengan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dengan masuknya investasi asing langsung ke Indonesia. Salah satunya adalah masuknya modal baru untuk membantu mendanai berbagai sektor yang kekurangan dana. Investasi asing ini juga banyak membuka lapangan kerja baru sehingga angka pengangguran dapat berkurang. Selain itu, masuknya investasi asing biasanya disertai dengan transfer teknologi. Mereka membawa pengetahuan teknologi baru ke Indonesia yang lama-kelamaan akan dikembangkan pula di Indonesia. Tidak menutup kemungkinan pula para investor asing akan bekerjasama dengan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Keterlibatan UMKM ini tentunya akan

---

<sup>79</sup> Pemerintah Provinsi Lampung, “Provinsi Lampung Peringkat Tujuh Nasional Daerah Tujuan Investasi”, <https://lampungprov.go.id/>, 2017.

<sup>80</sup> Kementerian Investasi BKPM, “Proyek Investasi Di Lampung Tahun 2023”, <https://kupastuntas.co/>, 2023.



mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat. UMKM atau perusahaan dalam negeri juga berpeluang untuk memasarkan produknya ke pasar Internasional. Manfaat yang paling nyata dari masuknya investasi asing adalah meningkatkan pendapatan negara melalui pajak. Selain itu, menciptakan hubungan yang lebih stabil dalam lingkup perekonomian dua negara.<sup>81</sup>

Menurut Machmud, merujuk pada pasal 3 ayat 2 UU Nomor 25 Tahun 2007 bahwa tujuan serta manfaat dari penyelenggaraan penanaman modal antara lain ialah:<sup>82</sup>

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional
- 2) Menciptakan lapangan kerja
- 3) Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan
- 4) Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional
- 5) Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional
- 6) Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan
- 7) Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri
- 8) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan menurut Kurniawan ada beberapa anggapan mengenai manfaat investasi asing, bagi suatu negara:<sup>83</sup>

- 1) Investasi asing akan menciptakan perusahaan baru, memperluas pasar atau merangsang penelitian dan pengembangan teknologi lokal baru.
- 2) Penanaman modal asing akan meningkatkan daya saing industri ekspor, dan menggerakkan ekonomi lokal melalui pasar kedua (sektor keuangan) dan ketiga (barang/jasa).

---

<sup>81</sup> BKPM, "Penanaman Modal Asing Di Indonesia."

<sup>82</sup> Amir Machmud, *Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi...*, 102.

<sup>83</sup> Chandra Kurniawan, "Pengaruh Investasi Terhadap Perekonomian Indonesia", *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, Vol. 12, No. 4, (2019), 9.

- 3) Penanaman modal asing akan meningkatkan penerimaan pajak dan meningkatkan pendapatan daerah atau negara, serta memperkuat nilai mata uang lokal untuk pembiayaan impor.
- 4) Pembayaran utang sangat penting untuk melindungi keberadaan barang keuangan di pasar internasional dan mengelola integritas sistem keuangan. Kedua ini sangat menentukan kelangsungan pembangunan.
- 5) Sebagian besar negara dunia ketiga bergantung pada investasi asing untuk memenuhi kebutuhan modal pembangunan karena sumber daya lokal tidak tersedia atau tidak mencukupi.
- 6) Pendukung penanaman modal asing berargumen bahwa begitu masuknya penanaman modal asing, maka akan menjadi landasan masuknya investasi yang lebih banyak lagi, yang pada gilirannya menjadi pilar yang kokoh bagi pembangunan ekonomi secara keseluruhan.

Selanjutnya, beberapa alasan mendasar yang dikemukakan oleh Kurniawan mengapa suatu negara-negara berkembang membutuhkan investasi asing:<sup>84</sup>

- 1) Penyediaan lapangan kerja
- 2) Mengembangkan industri substitusi impor untuk menghemat devisa. Kehadiran modal asing dapat digunakan untuk membantu mengembangkan industri substitusi impor dalam rangka menghemat devisa.
- 3) Mendorong mengembangkannya industri barang-barang ekspor non-migas untuk mendapatkan devisa.
- 4) Pembangunan daerah-daerah tertinggal. Investasi asing diharapkan sebagai salah satu sumber pembiayaan dalam pembangunan yang dapat digunakan untuk membangun infrastruktur seperti

---

<sup>84</sup> *Ibid...*, 9.

pelabuhan, listrik, air bersih, jalan, rel kereta api, dan teknologi lainnya.

- 5) Alih teknologi. Salah satu tujuan yang mengundang modal asing adalah untuk mewujudkan alih teknologi

e. Indikator Keputusan *Foreign Direct Investment* (FDI)

Investasi merupakan suatu masalah yang langsung berhubungan dengan besarnya pengharapan akan pendapatan dari barang modal di masa depan. Pengharapan akan pendapatan masa depan inilah merupakan faktor penting untuk mengukur besarnya investasi suatu negara. Berikut merupakan indikator yang digunakan dalam mengukur faktor keputusan investasi seseorang:<sup>85</sup>

a) Tingkat keuntungan yang akan diperoleh

Individu, perusahaan dan organisasi akan memperoleh keuntungan dari investasi dalam beberapa waktu (tahun) yang akan datang.

b) Tingkat suku bunga

Tingkat pengembalian investasi harus lebih tinggi dari pada pembayaran tingkat bunganya. Suku bunga yang dimaksud tersebut masuk dalam ranah konvensional, jika dalam perspektif Islam, suku bunga merupakan sesuatu yang diharamkan. Sehingga tingkat bunga tidak masuk dalam perhitungan investasi.

c) Prediksi kondisi ekonomi di masa yang akan datang

Kestabilan dalam perekonomian sangat dibutuhkan bagi seseorang investor untuk menanamkan modal atau investasi di suatu negara. Di samping itu harus dideteksi atau diprediksi pula

---

<sup>85</sup> Husna Ni'matul Ulya, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teori Makro Ekonomi Konvensional Dan Islam*, (Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2021), 44.

negara tempat berinvestasi bagaimana kinerja perekonomiannya bagus atau tidak.

d) Tingkat inflasi<sup>86</sup>

Tingkat inflasi berpengaruh negatif pada tingkat investasi hal ini disebabkan karena tingkat inflasi yang tinggi akan meningkatkan risiko proyek-proyek investasi dan dalam jangka panjang inflasi yang tinggi dapat mengurangi rata-rata masa jatuh pinjam modal serta menimbulkan distorsi informasi tentang harga-harga relatif.

e) Tingkat Pendapatan Nasional

Dengan adanya tingkat pendapatan yang tinggi maka akan mendorong permintaan terhadap barang dan jasa, sehingga keuntungan perusahaan akan bertambah dan akan mendorong kegiatan investasi yang lebih banyak, jika pendapatan nasional bertambah maka nilai pasar investasi akan bertambah pula.

f) Pengaruh Infrastruktur<sup>87</sup>

Pembangunan kembali infrastruktur tampaknya menjadi satu alternatif pilihan yang dapat diambil oleh pemerintah dalam rangka menanggulangi krisis. Pembangunan infrastruktur akan menyerap banyak tenaga kerja yang selanjutnya akan berpengaruh pada meningkatnya gairah ekonomi masyarakat. Dengan infrastruktur yang memadai, efisiensi yang dicapai oleh dunia usaha akan makin besar dan investasi yang didapat semakin meningkat.

---

<sup>86</sup> Karya and Syamsuddin, *Makro Ekonomi Pengantar Untuk Manajemen...*,

<sup>87</sup> *Ibid...*, 78.

f. Faktor-faktor Mempengaruhi *Foreign Direct Investment* (FDI)

Menurut Karya, faktor yang mempengaruhi para investor agar melakukan investasi asing langsung adalah sebagai berikut:<sup>88</sup>

- 1) Apresiasi mata uang dari negara-negara yang jumlah investasinya cukup tinggi, yaitu Jepang, Korea Selatan, Hongkong, dan Taiwan. Adanya apresiasi mata uang negara asal investor terhadap mata uang negara tujuan investor, dapat mendorong para investor asing melakukan investasi langsung, hal ini dikarenakan melakukan investasi menjadi sangat murah, karena nilai mata uang negara tujuan investor menjadi sangat kecil dari nilai mata uang negara asal investor.
- 2) Pencabutan GSP (*Generalized System of Preferences*) terhadap empat negara industri baru di Asia (Korea Selatan, Taiwan, Hongkong, dan Singapura). *Generalized System of Preferences* (GSP) merupakan suatu konsesi yang diberikan oleh negara maju (negara donor) kepada negara-negara berkembang dengan maksud industri di negara-negara berkembang tersebut dapat cepat maju. Konsesi yang diberikan adalah dalam wujud, pembebasan tarif, penurunan tarif, keringanan bea masuk, kelonggaran kuota, perlakuan cepat dan sistem pembayaran. Dengan dicabutnya GSP terhadap empat negara tersebut, menjadikan daya saing produk ekspor yang dihasilkan oleh negara-negara tersebut menjadi rendah apabila dibandingkan dengan produk negara lain, hingga tidak kompetitif lagi.

---

<sup>88</sup> *Ibid...*, 75-76.

- 3) Meningkatnya biaya produksi di luar negeri, terutama di negara- negara NIC'S. Dengan meningkatnya biaya produksi di negara asal investor berarti tingkat keuntungan yang diperoleh investor akan semakin menipis. Dengan pertimbangan ingin memperoleh tingkat keuntungan yang besar, maka para investor mulai berpikir untuk mengalihkan usahanya di luar negeri terutama di negara berkembang yang masih rendah upah tenaga kerjanya dan untuk mendekati produk dengan pasar, sehingga bagi perusahaan yang padat karya, dengan upah tenaga kerja yang rendah dan ongkos distribusi rendah akan menghemat biaya produksi.

g. Teori *Foreign Direct Investment* (FDI)

Pada dasarnya ada beberapa teori investasi yang mencoba menjelaskan apa alasan pihak investor melakukan investasi ke luar negeri maupun alasan negara mau menerima dan bahkan mengundang investor asing masuk ke negaranya. Beberapa teori ekonomi yang berpengaruh dibidang penanaman modal, terutama penanaman modal asing, antara lain adalah:<sup>89</sup>

1) Teori Ekonomi Neo-Klasik (*Neo Classical Economic Theory*)

Menurut teori ini FDI memiliki kontribusi yang positif terhadap pembangunan ekonomi suatu negara. Teori ini berhasil meyakinkan kebanyakan para ahli ekonomi bahwa, penanaman modal asing secara langsung (*Foreign Direct Investment*) akan lebih memberi keuntungan kepada *host country*. Inti dari pandangan teori ini mengatakan bahwa kegiatan penanaman modal di kebanyakan negara berkembang secara teoritis penanaman modal asing secara

---

<sup>89</sup> Marthen Arie, *Hukum Penanaman Modal*, (Makassar: Nas Media Pustaka, 2022), 7.

langsung memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi di negara-negara *host country*.

Dalam teori ekonomi pembangunan, negara-negara sedang berkembang sangat membutuhkan aliran penanaman modal sebagai jalan menuju pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), dan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut, negara-negara *host country* tidak hanya mengandalkan pada faktor pembiayaan dalam negeri, seperti tabungan masyarakat, tetapi juga diperoleh melalui pemodal asing. Harrod Domar dalam Marthen, mengemukakan bahwa untuk meningkatkan perekonomian suatu negara dibutuhkan modal karena modal dipandang sebagai sumber pembiayaan ekonomi produktif untuk menghasilkan barang dan jasa sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat. Keadaan ini menuntut adanya penanaman modal untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan dalam perekonomian. Dengan demikian penanaman modal memiliki pengaruh yang signifikan untuk memajukan perekonomian suatu negara. Di sini penanaman modal asing dapat menciptakan lapangan kerja besar ke negara penerima modal, turunnya pengangguran, *saving* naik dan pendapatan lebih baik.

## 2) Teori Ketergantungan (*Dependency Theory*)

Teori ketergantungan (*dependencia*) dimunculkan sebagai reaksi terhadap dampak penanaman modal asing bagi *host country* itu negatif. Berbeda dengan penganut ekonomi neo-klasik, penanaman modal yang dilakukan oleh pemodal asing, yang bernapaskan *laissez faire* dan *free trade* menyebabkan keterbelakangan (*under development*),

dan sifatnya sangat merugikan proses pembangunan di negara-negara sedang berkembang. Asumsi dasar dari teori ini adalah dampak pada pengurusan kekayaan *host country*. Kehadiran penanaman modal asing berdampak tidak hanya pada pengurusan kekayaan negara tersebut, tetapi juga sistem perekonomiannya, yaitu suatu sistem ekonomi yang mandiri menjadi sistem ekonomi yang tergantung pada kekuatan modal asing atau kekuatan ekonomi negara maju.

Dengan adanya ekspansi modal, perusahaan-perusahaan para investor asing tersebut, jelas sangat berpengaruh terhadap sistem ekonomi *host country*. Meski membawa arus modal yang sangat besar, tetapi penanaman modal asing tidak serta merta mengatasi problema pembangunan. Penganjur teori ini berpendapat, bahwa aktivitas penanaman modal asing di negara-negara berkembang tidak terlepas dari motif penguasaan atas sumber kekayaan alam. Dalam perkembangan selanjutnya kegiatan penanaman modal asing ini semakin menjurus ke arah eksploitasi alam yang berpotensi menghancurkan daya dukung lingkungan dan peminggiran pengusaha lokal serta masyarakat. Oleh karena itu, para penganut teori ini menganjurkan untuk menghindari dominasi modal asing sehingga *host country* dapat melepaskan diri dari ketergantungan ekonomi modal asing.

### 3) Teori Pertengahan (*The Middle Path Theory*)

*Middle Path theory* sebagai salah satu teori ekonomi yang paling penting dan banyak diterapkan pada upaya negara-negara berkembang untuk mengendalikan dampak penanaman modal asing dalam proses pembangunan ekonominya. Teori ini yang diperkenalkan oleh M. Sornarajah, yang dikenal dengan teori “jalan tengah”. Asumsi dasar dari teori



ini adalah dampak positif dan dampak negatif aktivitas penanaman modal asing terhadap *host country*. Tidak dapat dipungkiri bahwa dampak positif dari aktivitas penanaman modal asing bagi *host country* sebagaimana diyakini oleh pengajar teori ekonomi neo-klasik yang pro modal, demikian pula sebaliknya, penganjar teori *dependensia* yang anti modal asing beranggapan bahwa adanya penanaman modal asing sangat merugikan proses pembangunan *host country*. Dua-duanya mempunyai argumen yang sama kuatnya. Namun demikian, yang paling dicemaskan adalah dampak negatif dari aktivitas penanaman modal asing walaupun mereka membawa modal masuk ke *host country* yang sangat besar, tetapi dikhawatirkan ketergantungan ekonomi *host country* atas dominasi kekuatan modal asing itu.

Teori ini menganjurkan kepada pengambil kebijakan di *host country* ini mampu mengelola dan menjinakkan para penanam modal asing tersebut, sehingga tidak merugikan perekonomian nasionalnya. Dengan kata lain, apa yang harus dilakukan oleh negara-negara berkembang adalah mengatur dan mengawasi aktivitas penanaman modal asing sedemikian rupa sehingga aliran modal asing dapat menjadi jalan yang ampuh untuk mengatasi problema pembangunannya. Dari pandangan teori jalan tengah yang disingkat di atas, polarisasi teori ekonomi klasik dan teori ketergantungan dapat dipahami sebagai fungsi pertumbuhan ekonomi di mana aliran modal asing dapat dipercaya sebagai jalan menuju proses akumulasi modal, dan akan meningkatkan kekayaan *host country*.

h. *Foreign Direct Investment (FDI)* dalam Perspektif Ekonomi Islam

Investasi dalam konsep ekonomi Islam, yang dianjurkan bagi setiap umat muslim adalah investasi modal yang sebaik-baiknya menurut Al-Qur'an adalah diniatkan untuk *ibtighai mardhatillah* (menurut keridhaan Allah). Bagi individu, investasi merupakan kebutuhan *fitrawi*, dimana setiap individu, pemilik modal, selalu berkeinginan untuk menikmati kekayaan itu dalam waktu dan bidang seluas mungkin. Dalam Islam investasi merupakan kegiatan *muamalah* yang sangat dianjurkan, karena berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain.<sup>90</sup>

Kelebihan dari penanaman modal adalah memberikan nilai tambah akan barang dan jasa, lapangan pekerjaan, tanpa surplus usaha serta mendorong mobilitas prekonomian dan meningkatkan peradaban masyarakat suatu negara. Risikonya jika investasi ini tidak dapat memenuhi kebutuhan publik hanya akan sia-sia investasi tersebut. Namun disamping itu dalam ekonomi Islam pelaku investasi tidak menuntut secara pasti akan hasil yang akan datang, hasil investasi dimasa yang akan datang sangat dipengaruhi oleh banyak faktor baik faktor yang dapat diprediksi maupun tidak dapat diprediksi, aktivitas ekonomi maupun bisnis investasi dalam Islam merupakan salah satu bentuk ibadah, oleh karena itu, prinsip utamanya harus *halal* dan *thayyib*, serta terhindar dari unsur ribawi serta tidak berlebihan (*israf*).<sup>91</sup>

Investasi menurut ekonomi Islam merupakan kegiatan dalam menempatkan dana berdasarkan prinsip syariah. Investasi sesuai syariah Islam adalah investasi yang halal dan tidak mengandung unsur riba, *maysir* dan *gharar*. Para investor muslim dapat memilih di antara tiga alternatif untuk

---

<sup>90</sup> Husna Ni'matul Ulya, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teori Makro Ekonomi Konvensional Dan Islam*, (Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2021), 45.

<sup>91</sup> Amalia Nuril Hidayati, "Investasi : Analisis Dan Relevansinya Dengan Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 2, (2017), 227–242.

memanfaatkan dananya, yaitu, memegang dananya dalam bentuk tunai, memegang dananya dalam bentuk aset-aset yang tidak menghasilkan pendapatan (deposito bank, pinjaman, properti, perhiasan) atau menginvestasikan dananya. Dua alternatif pertama tidak disarankan dalam perekonomian Islam karena seperti kita lihat, Islam mengikut sertakan biaya dalam bentuk zakat pada dana-dana yang tidak termanfaatkan (*idle assets*).<sup>92</sup>

Dalam Al-Qur'an dijelaskan bagaimana penanaman modal yang baik, sesuai dengan surah Yusuf ayat 47, Allah Swt. berfirman:

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ٤٧

Artinya: “Dia (Yusuf) berkata, “agar kamu bercocok tanam tujuh tahun (berturut-turut) sebagaimana biasa; kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan ditangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan”. (Q.S Yusuf (12): 47)

Berdasarkan kandungan ayat di atas ialah, kelak akan datang musim subur dan banyak hujan kepada penduduk bumi selama tujuh tahun berturut-turut. Sapi ditakbirkan dengan tahun karena sapilah yang dipakai untuk membajak tanah dan lahan yang digarap untuk menghasilkan buah-buahan dan tanam-tanaman, yaitu bulir-bulir gandum yang hijau (subur). Banyaknya hasil yang diperoleh dari panen dimusim-musim subur selama tujuh tahun itu, harus dibiarkan hasilnya pada bulir-bulirnya, agar dapat disimpan untuk jangka waktu yang lama dan menghindari kebusukan, terkecuali sekadar apa yang kalian makan, maka boleh dipisahkan dari bulirnya. Dan makanlah dalam kadar yang minim, jangan berlebih-lebihan agar jumlah makanan yang ada dapat cukup menutupi kebutuhan makan kalian selama musim-musim pakeklik yang

<sup>92</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 297.

lamanya tujuh tahun. Musim paceklik yang berturut-turut selama tujuh tahun. Karena dalam musim paceklik semua persediaan makanan yang mereka kumpulkan di musim subur habis mereka makan.<sup>93</sup>

Berdasarkan ayat di atas, investasi yang dilakukan sesuai dengan syariat, maka investasi tersebut sesuatu hal yang dianjurkan dalam Islam. Islam menekankan bahwa setiap investor bertindak secara profesional dalam mengelola sumber modal dan dapat menggunakannya untuk objek yang tepat karena dengan berinvestasi akan meratakan pendapatan dan meningkatkan ekonomi. Orang yang tidak mempunyai modal untuk melakukan bisnis dapat terbantu dengan adanya investasi. Selain itu investasi juga bertujuan agar harta tidak bertumpuk dikalangan orang-orang kaya saja, melainkan juga bisa dirasakan bagi orang-orang yang tidak mampu dalam hal permodalan usaha.<sup>94</sup>

### 3. Konsep Pengeluaran Pemerintah

#### a. Definisi Pengeluaran Pemerintah

Menurut Karya, pengeluaran pemerintah diartikan sebagai penggunaan uang dan sumber daya suatu negara untuk membiayai suatu kegiatan negara atau pemerintah dalam rangka mewujudkan fungsinya dalam melakukan kesejahteraan masyarakat.<sup>95</sup>

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.<sup>96</sup>

---

<sup>93</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifai, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 859-860.

<sup>94</sup> Trisno Wardy Putra, "Investasi Dalam Ekonomi Islam", *Ulumul Syari*, Vol. 7, No. 2, (2018), 49-57.

<sup>95</sup> Detri Karya and Syamri Syamsuddin, *Makro Ekonomi Pengantar Untuk Manajemen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 179.

<sup>96</sup> *Ibid...*, 180.

Aries Djaenuri mengemukakan bahwa pengeluaran pemerintah adalah dana yang keluar dari kas pemerintah atau negara untuk membiayai aktivitas pemerintah. Pengeluaran pemerintah memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun di negara sedang berkembang karena menjalankan fungsi sebagai agent of development dan seiring pula dengan peningkatan ekonomi suatu negara.<sup>97</sup>

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Lampung pengeluaran berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari, belanja tidak langsung, belanja langsung, dan pembiayaan daerah. Belanja tidak langsung diantaranya adalah belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan keuangan, belanja bantuan sosial, belanja tak terduga, dan belanja bagi hasil. Belanja langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.<sup>98</sup>

Berdasarkan pengertian pengeluaran pemerintah di atas dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah adalah seluruh pengeluaran yang digunakan oleh pemerintah untuk keberlangsungan kegiatan pemerintahan dalam menjaga kestabilan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

#### b. Teori Pengeluaran Pemerintah

Mangkoesobroto menyebutkan teori pengeluaran pemerintah secara makro dikemukakan oleh tiga ahli ekonomi yang berbeda yaitu Rostow dan Musgrave, Adolf Wegner, dan Peacock dan Wiseman. Rostow dan Musgrave menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yaitu tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Perkembangan pengeluaran pemerintah oleh Adolf Wagner menjelaskan bahwa semakin

---

<sup>97</sup> H M Aries Djaenuri, "Keuangan Negara Dan Daerah (Pendekatan Administrasi)", (Jakarta, 2016), 28.

<sup>98</sup> Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, " Statistik Keuangan Daerah Provinsi Lampung 2020."

meningkatnya pendapatan per kapita dalam suatu perekonomian maka secara relatif pengeluaran pemerintah akan meningkat. Hukum Wagner yang terkenal yaitu "*The Law of Expanding State Expenditure*" dimana pengeluaran pemerintah terus meningkat disebabkan oleh peranan pemerintah yang semakin besar dalam mengurus segala aktivitas yang berhubungan dengan masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi dan kebudayaan. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai teori pengeluaran pemerintah secara makro yang dikemukakan oleh 3 ahli ekonomi di atas:<sup>99</sup>

#### 1) Teori Rostow dan Musgrave

Rostow dan Musgrave menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut pada tahap awal jadinya perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar karena pemerintah harus menyediakan fasilitas dan pelayanan seperti pendidikan kesehatan, transportasi, kemudian pada tahap menengah terjadinya pembangunan ekonomi, pemerintah masih diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat semakin meningkat, tetapi pada tahap ini peranan investasi swasta juga semakin besar. Sebenarnya peranan pemerintah juga tidak kalah besar dengan peranan swasta. Semakin besarnya peranan swasta juga banyak menimbulkan kegagalan pasar yang terjadi.

Musgrave memiliki pendapat bahwa investasi swasta dalam persentase terhadap GNP semakin besar dan persentase investasi pemerintah dalam persentase terhadap GNP akan semakin kecil. Pada tingkat ekonomi selanjutnya, Rostow mengatakan

---

<sup>99</sup> Karya and Syamsuddin, *Makro Ekonomi Pengantar Untuk Manajemen...*, h.180-182.

bahwa aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat.

## 2) Teori Adolf Wagner

Adolf Wagner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Tendensi ini oleh Wagner disebut dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah. Inti teorinya yaitu makin meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan.

Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan, dan sebagainya.

Berkaitan dengan hukum Wagner, dapat dilihat beberapa penyebab semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah, yakni meningkatnya fungsi pertahanan keamanan dan ketertiban, meningkatnya fungsi kesejahteraan, meningkatnya fungsi perbankan dan meningkatnya fungsi pembangunan. Teori Wagner mendasarkan pandangannya pada suatu teori yang disebut *organic theory of state* yaitu teori organis yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak terlepas dengan masyarakat lain.

### 3) Teori Peacock dan Wiseman

Teori ini didasarkan pada suatu analisis penerimaan pengeluaran pemerintah. Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan memperbesar penerimaan dari pajak, padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat.

Dalam keadaan normal meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat di mana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena.

Dalam teori Peacock dan Wiseman terdapat efek penggantian (*displacement effect*) yaitu adanya gangguan sosial yang menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah. Pengentasan gangguan tidak hanya cukup semata-mata dibiayai dengan pajak sehingga pemerintah harus meminjam dana dari luar negeri. Setelah gangguan teratasi muncul kewajiban melunasi utang dan membayar bunga. Pengeluaran pemerintah yang semakin bertambah bukan hanya karena GNP bertambah



tetapi karena adanya kewajiban baru tersebut. Akibat lebih lanjut adalah pajak tidak menurun kembali ke tingkat semula meskipun gangguan telah berakhir. Selain itu, masih banyak aktivitas pemerintah yang baru kelihatan setelah serjadinya perang dan ini disebut efek inspeksi (*inspection effect*).

### c. Indikator Pengeluaran Pemerintah

Indikator pengeluaran pemerintah daerah berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari belanja tidak langsung, tidak langsung dan pembiayaan daerah, sebagai berikut:<sup>100</sup>

#### 1) Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan tidak terikat langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan. Adapun yang termasuk kedalam belanja tidak langsung diantaranya sebagai berikut:

- a) Belanja pegawai, merupakan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, anggota DPRD, dan pegawai ASN.
- b) Belanja bunga, merupakan belanja atas bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman.
- c) Belanja subsidi, adalah belanja yang dianggarkan untuk pemberian subsidi dari pemerintah daerah agar harga jual produksi atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan

---

<sup>100</sup> Badan Pusat Statistik (BPS), "Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung 2021", <https://lampung.bps.go.id/publication/2022/11/30/9970142efb4afcfedc822eb5/statistik-keuangan-daerah-provinsi-lampung-2021.html>, diakses pada 09 Maret 2023 .

perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

- d) Belanja hibah, adalah belanja yang dianggarkan untuk pemberian hibah kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran.
- e) Belanja bantuan sosial, adalah belanja yang dianggarkan untuk pemberian bantuan berupa uang atau barang kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- f) Belanja Bagi Hasil, adalah pengeluaran uang yang mencakup pengeluaran bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa.
- g) Belanja Bantuan Keuangan, adalah pengeluaran berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
- h) Belanja Tidak Terduga, adalah pengeluaran untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

## 2) Belanja Langsung

Belanja tidak langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan tidak terikat langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan. Adapun yang termasuk kedalam belanja tidak langsung diantaranya sebagai berikut:

- a) Belanja pegawai, merupakan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada kepala daerah atau wakil kepala daerah, anggota DPRD, dan pegawai ASN.
- b) Belanja barang dan jasa, adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, termasuk barang yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga. Pembelian atau pengadaan barang dan jasa yang dimaksud meliputi bahan pakai habis, bahan atau material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa gedung, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atribut, pakaian kerja, pakaian khusus hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, lain-lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya, serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga.

c) Belanja Modal, adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Pembentukan aset tersebut secara rinci meliputi pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan, alat-alat bengkel, alat-alat pertanian, peralatan dan perlengkapan kantor, komputer, meubel, air, peralatan dapur, penghias ruangan, alat-alat studio, alat-alat komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, konstruksi jalan, jembatan, jaringan air, penerangan jalan, taman dan hutan kota, instalasi listrik dan telepon, bangunan, buku/kepuustakaan, barang seni, pengadaan hewan/ternak dan tanaman, serta persenjataan/keamanan.

### 3) Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran, sebaliknya surplus anggaran akan dialokasikan dalam pengeluaran pembiayaan, baik untuk pembayaran pokok hutang, maupun untuk investasi atau

pembentukan dana cadangan. Adapun yang termasuk pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

a) Penerimaan pembiayaan daerah;

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu. Merupakan selisih lebih dari surplus/defisit ditambah dengan pos penerimaan pembiayaan dikurangi dengan pos pengeluaran pembiayaan, pada periode anggaran tahun yang lalu.
- (2) Transfer dari dana cadangan. Penerimaan daerah yang diperoleh dari pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Penerimaan pinjaman dan obligasi. Semua penerimaan dari pinjaman daerah, termasuk atas penerimaan penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada anggaran tahun berjalan.
- (4) Hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Semua penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan oleh pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

b) Pengeluaran pembiayaan daerah;

- (1) Transfer ke dana cadangan  
Pengeluaran untuk membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

(2) Penyertaan modal

Pengeluaran daerah yang dialokasikan pada penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, permanen atau non permanen. Investasi ini dapat berupa deposito berjangka, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), saham, penanaman modal pada BUMN/BUMD, pembelian obligasi dan surat utang jangka panjang.

(3) Pembayaran utang pokok yang jatuh tempo

Pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

(4) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan

Merupakan selisih lebih dari surplus/defisit ditambah dengan pos penerimaan pembiayaan dikurangi dengan pos pengeluaran pembiayaan.

d. Pengeluaran Pemerintah dalam Perspektif Ekonomi Islam

Prinsip ekonomi Islam mengenai anggaran belanja pemerintah dan kebijakan fiskal bertujuan untuk mengembangkan kesejahteraan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spritual pada tingkat yang sama. Kebijakan fiskal dianggap sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi perilaku manusia yang dipengaruhi melalui insentif yang disediakan dengan meningkatkan pemasukan pemerintah (melalui perpajakan, pinjaman atau

jaminan terhadap pengeluaran pemerintah). Dalam Islam pengeluaran pemerintah menitik beratkan pada masalah pelayanan terhadap urusan umat, yang telah diserahkan oleh *syara*” dan ditetapkan sesuai dengan apa yang menjadi pandangan agama Islam.<sup>101</sup> Dalam hal ini bermaksud untuk *kemaslahatan* seluruh umat. Demikian hal ini sesuai dengan firman-Nya, yang dijelaskan dalam Q.S Al-Hasyr ayat 7, bahwa Allah Swt. berfirman:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝٧

Artinya: “*Harta rampasan fai*’ yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yaim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu akan ditinggalkan. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya”. (Q.S Al-Hasyr (59):7)

Kandungan ayat di atas ialah, ketika kaum muslim dijalan yang lurus dan berdamai dengan tuhan mereka, maka mereka akan mewarisi negara itu dan Bani Israil akan kembali ke tanah-tanah dari mana mereka berasal. Rasulullah menghadirkan tanah Bani Al-Nadlir kepada kaum fakir Muhajirin. Dengan begitu, keseimbangan kembali lagi ke dalam masyarakat Islam di Madinah. Karena kaum Muhajirin

<sup>101</sup> Ihda Aini, “Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam”, *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, Vol. 17, No. 2, (2019), 8.

meninggalkan harta dan rumah mereka di Mekkah dan menanggung penderitaan ini semata-mata dalam rangka menegakkan agama Allah. Meski kaum Anshar telah menolong mereka, telah membuka hati dan rumah untuk mereka, namun penyelesaian terbaiknya mewariskan tanah kaum Yahudi kepada kaum Muhajirin.<sup>102</sup>

Berdasarkan ayat di atas, dalam Islam anggaran pengeluaran pemerintah biasanya selalu disesuaikan dengan keadaan ekonomi pada masa waktu tertentu. Pada dasarnya pemerintah haruslah berbelanja sesuai dengan pendapatan dan kebutuhannya, tujuannya sesuai dengan ayat di atas menunjukkan bahwa, menurut Al-Qur'an, kekayaan tidak boleh terkonsentrasi ditangan sedikit orang kaya saja, melainkan harus dengan bebas beredar di antara semua orang sehingga kaum miskin juga mendapat manfaat. Demikianlah, tujuan primer dari sistem ekonomi Islam adalah menjadi jembatan celah antara si kaya dan si miskin dengan merekayasa distribusi kekayaan maupun sumber-sumber ekonomi demi kebaikan mereka yang kurang beruntung.<sup>103</sup>

#### 4. Konsep PDRB Per Kapita

##### a. Definisi PDRB Per Kapita

PDRB per kapita menunjukkan nilai pendapatan rata-rata penduduk suatu wilayah atau daerah. Semakin tinggi nilai PDRB per kapita suatu wilayah tersebut, maka dapat diartikan bahwa semakin sejahtera pula penduduknya. Nilai PDRB per kapita ini juga digunakan untuk mengetahui taraf hidup penduduk disuatu wilayah atau daerah.<sup>104</sup> PDRB per kapita diperoleh dari pembagian nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun ditahun yang sama pada suatu

---

<sup>102</sup> Syeikh Muhammad Ghazali, *Tafsir Tematik Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004), 564.

<sup>103</sup> Arif, *Filsafat Ekonomi Islam...*, 40.

<sup>104</sup> Nurbayan and Hijri Juliansyah, "Pengaruh Pendapatan Perkapita, PDRB, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Konsumsi Masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2003-2016", *Jurnal Ekonomika Indonesia*, Vol. 7, No. 2, (2018), 45–51.



daerah atau wilayah. Oleh karena itu PDRB per kapita berasal dari nilai PDRB suatu daerah atau wilayah.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.<sup>105</sup>

Pada dasarnya PDRB merupakan jumlah nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan dari suatu daerah dengan periode tertentu. Analisis tentang perencanaan, pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi pada umumnya menggunakan PDRB sebagai data dan informasi yang mendasar.<sup>106</sup>

Perekonomian daerah dikatakan bagus apabila nilai PDRB nya tinggi dan menunjukkan angka yang stabil dan tidak fluktuatif, sedangkan perekonomian daerah dikatakan kurang bagus apabila nilai PDRB nya bermasalah seperti nilai PDRB

---

<sup>105</sup> Badan Pusat Statistik, “Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)”, <https://www.bps.go.id/subject/171/produk-domestik-regional-bruto--pengeluaran-.html>, 2023. Diakses pada 11 Maret 2023.

<sup>106</sup> Anggel Dwi Satria, Ridwansyah Ridwansyah, and Ahmad Habibi, “Pengaruh Sektor Produk Domestik Regional Bruto (Basis Dan Non Basis) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 1, (2023), 1213–1226.

rendah dan mengalami fluktuatif.<sup>107</sup> Dalam hal ini dengan nilai PDRB yang tinggi dan tidak fluktuatif dapat mengurangi angka kemiskinan, karena dengan tingginya PDRB pembangunan dapat dioptimalkan sehingga tercapailah kesejahteraan masyarakat suatu daerah atau wilayah.

## b. Pendekatan PDRB

Menurut Badan Pusat Statistik merujuk pada teori ekonomi makro, perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara konseptual menggunakan tiga macam pendekatan, sebagai berikut:<sup>108</sup>

### 1) Pendekatan Produksi

Unit-unit produksi dalam penyajian ini di kelompokkan menjadi 9 lapangan usaha yaitu:

- a) Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan
- b) Pertambangan dan Penggalian
- c) Industri Pengolahan
- d) Listrik, Gas dan Air Bersih
- e) Konstruksi
- f) Perdagangan, Hotel dan Restoran
- g) Pengangkutan dan Komunikasi
- h) Keuangan, *Real Estate* dan Jasa Perusahaan
- i) Jasa-jasa, jasa pelayanan pemerintah. Setiap sektor dirinci menjadi sub-sub sektor.

### 2) Pendekatan Pendapatan

Dalam pendekatan pendapatan, mencerminkan PDRB per kapita, karena menurut pendekatan ini PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu

<sup>107</sup> Demitianus Murib, “Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendapatan Perkapita, PDRB Terhadap PAD Di Kabupaten Mimika Provinsi Papua”, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 18, No. 01, (2018), 23–33.

<sup>108</sup> Badan Pusat Statistik, “Pendekatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)”, diakses pada 11 Maret 2023 <https://www.bps.go.id/subject/52/produk-domestik-regional-bruto--lapangan-usaha-.html>, 2023.

tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan, semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

### 3) Pendekatan Pengeluaran

Menurut pendekatan pengeluaran PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari:

- a) pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba
- b) pengeluaran konsumsi pemerintah
- c) pembentukan modal tetap domestik bruto
- d) perubahan inventori, dan
- e) ekspor neto (ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi.

### c. Indikator PDRB Per Kapita<sup>109</sup>

PDRB per kapita adalah PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Besaran ini dipengaruhi oleh jumlah penduduk pertengahan tahun, dalam arti bahwa semakin besar jumlah penduduk akan semakin kecil besaran PDRB per kapita wilayah tersebut. Semakin tinggi PDRB per kapita suatu wilayah semakin baik tingkat perekonomian wilayah tersebut, walaupun ukuran ini tidak dapat memperlihatkan kesenjangan pendapatan antar penduduk. Meskipun terdapat keterbatasan, Indikator PDRB per kapita ini cukup memadai untuk mengetahui tingkat perekonomian

---

<sup>109</sup> Setyo Winarno, *Indikator Ekonomi*, (Sidoarjo: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2019), 11-12.

suatu wilayah dalam lingkup makro, paling tidak sebagai acuan memantau kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan produk domestik barang dan jasa di wilayah tersebut. PDRB per kapita umumnya disajikan atas dasar harga berlaku yang dirumuskan sebagai berikut:

$$PDRB \text{ Per Kapita} = \frac{PDRB \text{ ADHB}}{\text{Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun}}$$

*Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun*

\*ADHB= Atas Dasar Harga Berlaku

Peningkatan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku ini masih memiliki keterbatasan, yaitu belum menunjukkan peningkatan sebenarnya dari daya beli perkapita karena beberapa hal sebagai berikut:

- 1) PDRB per kapita masih belum dapat mendeteksi kesenjangan penguasaan aset dan penerimaan balas jasa faktor produksi. Angka ini baru memberi petunjuk rata-rata pendapatan perkapita suatu wilayah.
- 2) Tingkat kenaikan harga masih ada di dalamnya.
- 3) Tingkat pertumbuhan penduduk juga masih berpengaruh.

#### d. PDRB Per Kapita dalam Perspektif Ekonomi Islam

PDRB per kapita mencerminkan pendapatan per kepala dari setiap masing-masing penduduk daerah atau wilayah tertentu, PDRB per kapita juga menjadi tolak ukur kesejahteraan suatu negara atau wilayah, semakin tinggi PDRB per kapita pada suatu wilayah atau negara semakin sejahtera pula penduduknya. Oleh karena itu, dalam Al-Qur'an dijelaskan bagaimana kita sebagai umat Islam harus mampu memahami konsep PDRB per kapita dalam memenuhi kebutuhan hidup berdasarkan perspektif ekonomi Islam dengan senantiasa bertakwa dan beriman kepada Allah Swt. yang telah melimpahkan berkahnya kepada kita, hal tersebut dijelaskan pada Q.S Al-A'raf ayat 96, Allah Swt. berfirman:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ٩٦

Artinya: “Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan” (Q.S Al-A’raf (7):96)

Kandungan ayat di atas ialah, Allah Swt. memberitahukan minimnya keimanan penduduk negeri yang didatangi oleh para rasul, yakni seandainya hati mereka membenarkan apa yang dibawa oleh para rasul itu dan mereka bertakwa dengan menjalankan aneka ketaatan dan meninggalkan aneka keharaman, niscaya Allah Swt. akan selalu memberikan keberkahan yakni berupa tetesan hujan dari langit dan tumbuh-tumbuhan di bumi. Namun apabila mereka mendustakan para rasulnya, maka Allah Swt. pun akan menyiksa mereka dengan membinasakannya lantaran aneka dosa dan keharaman yang telah mereka lakukan.<sup>110</sup>

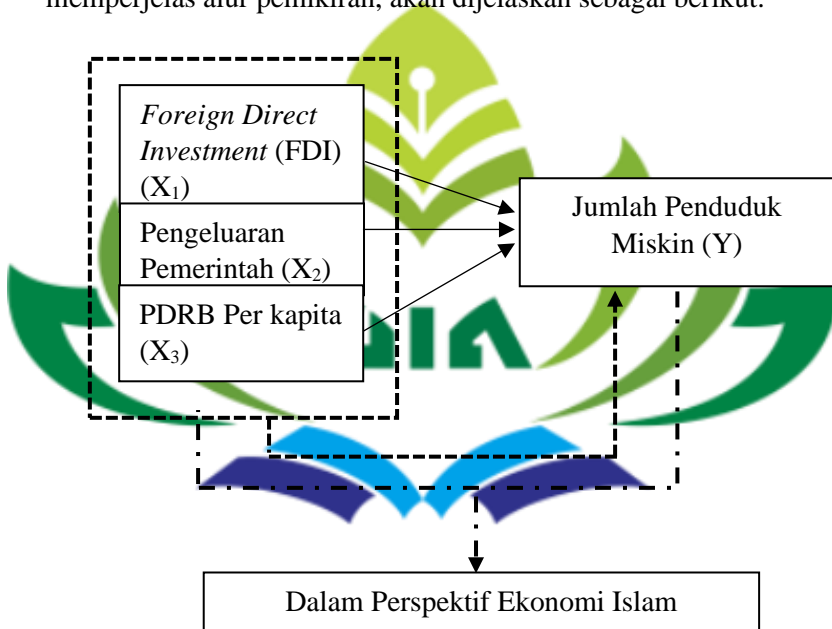
Ekonomi Islam yang sistemnya berparameter *falah* (kesejahteraan yang hakiki, kesejahteraan yang sebenarnya) berasumsi bahwa kesejahteraan itu diwujudkan pada peningkatan GNP/PDRB yang tinggi, jikalau dibagi dengan jumlah penduduk akan menghasilkan *per capita income* yang tinggi. Namun bukan berarti pendapatan per kapita sebagai satu-satunya komponen pokok yang menyusun kesejahteraan. *Al-falah* dalam pengertian Islam mengacu kepada konsep Islam tentang manusia itu sendiri (rohaniahnya). Karena itu seluruh kegiatan duniawi termasuk dalam aspek ekonomi

<sup>110</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifai, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2...*, 401-402.

diarahkan tidak saja untuk memenuhi tututan fisik *jasadiyah* melainkan juga memenuhi kebutuhan rohani manusia.<sup>111</sup>

## B. Kerangka Berfikir

Berdasarkan kerangka teoritik dan penelitian terdahulu di atas, dapat di simpulkan bahwa kemiskinan merupakan masalah yang kompleks. Dalam pelaksanaannya ada beberapa faktor yang menjadi pengaruh upaya pengentasan kemiskinan, yaitu diantaranya, *Foreign Direct Investment* (FDI) atau investasi asing, pengeluaran pemerintah, dan PDRB per kapita. Dalam hal ini, penelitian ini akan dikaji dalam perspektif ekonomi Islam guna memperjelas alur pemikiran, akan dijelaskan sebagai berikut:



**Gambar 2.2 Kerangka Berfikir**

<sup>111</sup> Husna Ni'matul Ulya, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teori Makro Ekonomi Konvensional Dan Islam*, (Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2021), 32.

Keterangan:

- = X (Independen) berpengaruh secara parsial terhadap Y (dependen)  
 ----- = X (Independen) berpengaruh secara bersama-sama terhadap Y (dependen)  
 - . . . . . = X dan Y dalam perspektif ekonomi Islam

Berdasarkan kerangka pikir di atas, untuk memudahkan penelitian yang akan dilakukan maka peneliti ingin memperjelas akar pemikiran dalam penelitian ini, dimana *Foreign Direct Investment* (FDI) sebagai variabel ( $X_1$ ), Pengeluaran Pemerintah sebagai variabel ( $X_2$ ), dan PDRB Per kapita sebagai variabel ( $X_3$ ) dengan Jumlah Penduduk Miskin di provinsi Lampung tahun 2012-2021 sebagai variabel (Y). Dalam hal ini variabel *Foreign Direct Investment*, Pengeluaran Pemerintah dan PDRB Perkapita yang akan diuji apakah berpengaruh terhadap Jumlah Penduduk Miskin di provinsi Lampung dalam perspektif ekonomi Islam dengan teknik pengolahan data menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dan akan diuji menggunakan aplikasi *Eviews 10*.

### C. Pengajuan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan sementara untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan. Berdasarkan latar belakang, penelitian terdahulu, dan kerangka teoritik yang telah dipaparkan di atas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

1. *Foreign Direct Investment* (FDI) ( $X_1$ ) terhadap Jumlah Penduduk Miskin (Y).

Dalam teori ekonomi pembangunan, negara-negara sedang berkembang sangat membutuhkan aliran penanaman modal dalam perekonomian. Harrod Domar mengemukakan bahwa untuk meningkatkan perekonomian suatu negara dibutuhkan modal karena modal dipandang sebagai sumber pembiayaan ekonomi produktif untuk menghasilkan barang dan jasa sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat. Keadaan ini

menuntut adanya penanaman modal untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan dalam perekonomian. Dengan demikian tampak jelas bahwa penanaman modal memiliki pengaruh yang signifikan untuk memajukan perekonomian suatu negara. Di sini penanaman modal asing dapat menciptakan lapangan kerja besar ke negara penerima modal, turunnya pengangguran, *saving* naik dan pendapatan lebih baik.<sup>112</sup>

Ketika penanaman modal asing dapat memajukan perekonomian suatu negara dengan menciptakan lapangan kerja baru sehingga menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan suatu daerah maka dalam hal ini akan mengurangi laju pertumbuhan jumlah penduduk miskin pada daerah tersebut.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Hanifah Safitri dan Muhammad Saleh penanaman modal asing/investasi asing (PMA/FDI) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, yang artinya ketika FDI meningkat maka angka kemiskinan menurun. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis dalam penelitian ini:

H<sub>0</sub>: *Foreign Direct Investment* (FDI) tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di provinsi Lampung.

H<sub>a1</sub>: *Foreign Direct Investment* (FDI) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di provinsi Lampung.

2. Pengeluaran Pemerintah (X<sub>2</sub>) terhadap jumlah penduduk miskin (Y).

Teori Adolf Wagner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat

---

<sup>112</sup> Marthen Arie, *Hukum Penanaman Modal*, (Makassar: Nas Media Pustaka, 2022), 7.



maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan, dan sebagainya. Berkaitan dengan hukum wagner, dapat dilihat dampak dari tingginya pengeluaran pemerintah, yakni meningkatnya fungsi pertahanan keamanan dan ketertiban, meningkatnya fungsi kesejahteraan, meningkatnya fungsi perbankan dan meningkatnya fungsi pembangunan.<sup>113</sup>

Dalam hal ini ketika pendapatan per kapita meningkat, kesejahteraanpun meningkat, dan pembangunan ekonomi meningkat, menjelaskan secara tidak langsung bahwa pengeluaran pemerintah yang besar dalam kegiatan pembangunan dapat menekan angka kemiskinan sehingga angka kemiskinan disuatu negara atau wilayah tersebut lebih kecil atau menurun.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Muntina Juliana Evita dan Wiwin Priana Primandhana, pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, yang artinya ketika pengeluaran pemerintah naik maka angka kemiskinan menurun. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis dalam penelitian ini:

H0: Pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di provinsi Lampung.

Ha2: Pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di provinsi Lampung.

---

<sup>113</sup> Karya and Syamsuddin, *Makro Ekonomi Pengantar Untuk Manajemen...*, 181.

3. PDRB Per kapita (X3) terhadap jumlah penduduk miskin (Y).

PDRB per kapita menunjukkan nilai pendapatan rata-rata penduduk suatu wilayah atau daerah. Semakin tinggi nilai PDRB per kapita suatu wilayah tersebut, maka dapat diartikan bahwa semakin sejahtera pula penduduknya. Nilai PDRB per kapita ini juga digunakan untuk mengetahui taraf hidup penduduk disuatu wilayah atau daerah.<sup>114</sup>

Menurut pendekatan pendapatan yang mencerminkan PDRB per kapita, karena menurut pendekatan ini PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan. Perekonomian daerah dikatakan bagus apabila nilai PDRB nya tinggi dan menunjukkan angka yang stabil (tidak fluktuatif) dan meningkat, sedangkan perekonomian daerah dikatakan kurang bagus apabila nilai PDRB nya bermasalah seperti nilai PDRB rendah dan mengalami fluktuatif.<sup>115</sup>

Dalam hal ini dengan nilai PDRB per kapita yang tinggi dan tidak fluktuatif dapat mengurangi angka kemiskinan, karena dengan tingginya PDRB per kapita pembangunan dapat dioptimalkan sehingga tercapailah kesejahteraan masyarakat disuatu daerah atau wilayah.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Chyntia Dewi Elviera dan Dedi Irawan, PDRB per kapita memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, yang artinya ketika PDRB per kapita meningkat maka angka kemiskinan menurun. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis dalam penelitian ini:

---

<sup>114</sup> Nurbayan and Juliansyah, "Pengaruh Pendapatan Perkapita, PDRB, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Konsumsi Masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2003-2016"..., 45-51.

<sup>115</sup> Murib, "Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendapatan Perkapita, PDRB Terhadap PAD Di Kabupaten Mimika Provinsi Papua,"..., 23-33.

H0: PDRB per kapita tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di provinsi Lampung.

Ha3: PDRB per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di provinsi Lampung.

4. *Foreign Direct Investment* (FDI) (X1), Pengeluaran Pemerintah (X2), dan PDRB per kapita (X3) terhadap jumlah penduduk miskin (Y)

Berdasarkan skema teori lingkaran kemiskinan (*vicious circle of poverty*) dapat dijelaskan penyebab kemiskinan yaitu, *Pertama*, secara mikro kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. *Kedua*, kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan. *Ketiga*, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses ke modal.<sup>116</sup> Berdasarkan penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh beberapa peneliti:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Hanifah Safitri dan Muhammad Saleh bahwa *Foreign Direct investment* (FDI) berpengaruh negatif dan signifikan secara bersama-sama terhadap kemiskinan.
- b. Penelitian yang dilakukan oleh Muntina Juliana Evita dan Wiwin Priana Primandhana, belanja pemerintah atau pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif

---

<sup>116</sup> Amir Machmud, *Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi*, 284-285.

dan signifikan secara bersama-sama terhadap kemiskinan.

- c. Chyntia Dewi Elviera dan Dedi Irawan, PDRB per kapita memiliki pengaruh negatif dan signifikan secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan.

Artinya ketika variabel *Foreign Direct Investment* (FDI), Pengeluaran Pemerintah, dan PDRB Per kapita mengalami kenaikan akan mengurangi jumlah penduduk miskin, begitu pula sebaliknya. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis dalam penelitian ini:

H<sub>0</sub>: *Foreign Direct Investment* (FDI), Pengeluaran Pemerintah, dan PDRB perkapita tidak berpengaruh negatif signifikan secara bersama-sama terhadap jumlah penduduk miskin di provinsi Lampung.

H<sub>a123</sub>: *Foreign Direct Investment* (FDI), Pengeluaran Pemerintah, dan PDRB per kapita berpengaruh negatif dan signifikan secara bersama-sama terhadap jumlah penduduk miskin di provinsi Lampung.



